



NewsLetter

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

Edisi 10/NL/10/2016

Oktober 2016



Peringatan HPS, Momentum Pemerintah
Perlihatkan Capaian Kinerja di Bidang Pangan

Maksimalkan Potensi Sapi Indukan
Kementan Lakukan UPSUS SIWAB



Peringatan HPS Tahun 2016, Momentum
Pemerintah Perhatikan Capaian Kinerja
di Bidang 03

Maksimalkan Potensi Sapi Indukan
Kementan Lakukan UPSUS SIWAB 05

Mentan: "Sudah Saatnya Daerah
Perbatasan Jadi Lumbung Padi" 06

Pemerintah Berencana Bangun Embung
Di Seluruh Indonesia 08

Spirit Bagi Kementan Untuk Mewujudkan
Kedaulatan Pangan 09

Untuk Tingkatkan Indeks Pertanaman
Kementan Targetkan Pembangunan
Sumber Air 10

Program Lumbung Pangan di Perbatasan
Bagian Konsep Besar Kementan 12

Persediaan Pangan Nasional Masih Cukup
Untuk Kebutuhan Masyarakat 13

Untuk Atasi Musim Pecekelik
Kementan Laksanakan Terobosan
Baru 14

Mentan: "Gunakan Anggaran Yang Kecil
Untuk Tingkatkan Produksi" 15

Kementan Dorong Petani Gunakan
Benih Padi Hibrida 16

Untuk Wujudkan Kemandirian Asal Hewan
Mentan Ajak Peternak Gunakan Sistim IB 17

Program Kementan Targetkan
Swasembada Pangan Dimulai Dengan
Swasembada Beras 18

Kementan Akan Kembangkan Sorgun
Untuk Kurangi Ketergantungan
Impor Beras 20

Dukung Indonesia Jadi Lumbung Pangan
Kementan Perluas Area Tanam di Banten 21

Kementan Targetkan Peningkatan
Sektor Pertanian di Kabupaten Kebumen 22

Kementan Perkiraan Harga dan Stok Pangan
Aman Sampai Akhir Tahun 24

Bone Berpotensi Besar Kembangkan
Sapi dan Padi 25

Kalbar Mampu Produksi Bawang Diatas
rata-rata Nasional 26

Pengarah
Kepala Biro Humas dan Informasi Publik
Sekretariat Jenderal Kementerian
Pertanian

Penanggung Jawab
Ir. Marihot H. Panggabean, M.Si

Penyunting
Agus Sumantri, S.Sos

Pelaksana
Dra. Ria Satiti Irawati
Imam Santoso, SE

Anggota
Alice Raga Dewi, S.Sos
Ir. Rusman
Fajar Rahman, M.S.Ikom

Distribusi
Makmur

Narasumber
Pejabat Kehumasan unit Eselon I
Lingkup Kementerian Pertanian



Peringatan HPS 2016, Momentum Pemerintah Perlihatkan Capaian Kinerja di Bidang Pangan



Presiden RI Joko Widodo saat memberikan sambutannya pada Acara Puncak Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-36 Tahun 2016 di Boyolali Provinsi Jawa Tengah.

Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) merupakan sebuah momentum yang mengingatkan dunia bahwa kekuatan setiap negara ditentukan oleh kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh masyarakatnya secara berkelanjutan. Momen HPS juga merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan perhatian akan pentingnya penanganan masalah pangan baik di tingkat nasional, regional maupun global secara berkelanjutan.

"Dalam kondisi dunia di era global seperti pada saat ini, Indonesia harus siap berkompetisi, dimana semua negara di dunia saling bersaing untuk memperebutkan 3 hal yang strategis dan vital dengan negara-negara lainnya. Ada 3 hal strategis yang diperebutkan negara-negara di dunia, pertama adalah Pangan, kedua Energi, dan ketiga adalah Air, untuk itu, harus diantisipasi dan direncanakan dengan baik kebutuhannya" kata Presiden RI Joko Widodo saat memberikan sambutannya pada Acara Puncak Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-36 Tahun 2016 di Boyolali Provinsi Jawa Tengah (29/10).

Kegiatan HPS juga dijadikan sebagai jawaban kinerja pemerintah di bidang pangan, khususnya capaian kinerja selama 2 tahun. Masyarakat petani diperlihatkan hasil atau capaian program pembangunan pertanian. Serta mensyukuri capaian - capaian khususnya selama 2 tahun pemerintahan Kabinet Kerja. Dimana fokus Kabinet Kerja pada sektor pertanian yaitu mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Mensejahterakan Petani.

Peringatan Hari Pangan Sedunia yang diselenggarakan di Boyolali mengingatkan Boyolali merupakan daerah pertanian penghasil hortikultura tanaman pangan. Boyolali juga dikenal banyak penganeekaragaman/ diversifikasi tanaman yang dikembangkan di wilayahnya. Puncak peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) 2016 ditandai



dengan pelaksanaan panen padi teknologi Jarwo Super di Kecamatan Desa Trayu, Banyudono, Kab. Boyolali. Didampingi Menteri Pertanian dan Bupati Boyolali, Presiden melakukan panen padi di Dem Area seluas 100 hektare dengan teknologi Jajar Legowo Padi Super Varietas Inpari 32 tahun Hawar Daun Bakteri (HDB) menggunakan alat combine harvester.

Melihat hasil panen padi tersebut, Presiden memastikan pemerintah tidak akan mengimpor beras hingga akhir tahun 2016. Keputusan dilakukan menyusul tercukupinya stok beras nasional yang mencapai 1,98 juta ton saat ini stok nasional beras meningkat tajam dari bulan September - Oktober 2015 yang mencapai 1,030 juta ton. Dengan kondisi tersebut, Pemerintah memastikan hingga akhir tahun 2016 Indonesia tidak akan impor. Ke depan, Indonesia akan terus memprioritaskan memperbesar stok beras nasional.

"Stok pangan mendapatkan prioritas dari pemerintah untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat. Stok cukup sampai Mei, tahun ini saya pastikan tidak impor, apalagi Maret awal tahun depan Indonesia juga sudah memasuki panen raya kembali. Meski demikian, pemerintah tidak buru-buru ekspor beras. Tetapi terus berupaya memperbesar stok nasional, baru ekspor

Apalagi, ke depan persoalan pangan bakal menjadi perebutan negara-negara di dunia selain energi dan air. Kompetisi antar negara semakin ketat sehingga kita harus mempersiapkan diri sejak dini," kata Presiden.

Usai panen raya, Presiden juga memberikan bantuan kepada petani berupa benih padi unggulan varietas Inpari 30, Inpari 32, dan Inpari 33 yang merupakan varietas unggulan karena ingin melihat hasil Inpari 33 yang ditanam di 100 hektare di Boyolali.

"Kalau disini, hasilnya, biasanya hanya 5 ton/hektare ternyata berhasil dua kali lipat mencapai 10-11 ton/hektare. Kalau nanti ini sudah benar, akan diperluas sehingga produksi nasional bisa meningkat tajam," kata Presiden.

Presiden menyebutkan benih dengan kualitas terbaik merupakan kunci utama untuk meningkatkan produksi bahan pangan, terutama komoditas padi dan jagung. dengan benih yang unggul, produksi padi dan jagung dapat ditingkatkan dua kali lipat meskipun dengan luas lahan yang sama. Kuncinya ada di benih.

"Ini menjadi kunci nantinya agar kita dapat swasembada, dengan hektar yang sama

tapi hasilnya bisa dobel, kalau luas tanam padi tadinya 1 hektar biasanya menghasilkan 5 sampai 6 ton, sekarang bisa 11,3 ton padinya, Begitu pula jagung juga sama biasanya 5 sampai 6 ton juga, sekarang juga bisa 11 ton dan punya potensi ke 13 ton,” ucap Presiden.

Selain benih, khusus untuk tanaman jagung, Presiden juga mengatakan pengairan dan mekanisasi panen-tanam, yaitu penanaman kembali pasca panen juga tak kalah penting untuk mewujudkan swasembada. Untuk itu, di tahun 2017, Pemerintah akan berkonsentrasi membangun waduk - waduk berukuran kecil untuk mengairi embung di sekitar lahan tanam.

“Tahun depan konsentrasi pemerintah pada pembuatan embung yaitu waduk-waduk kecil yang bisa mengairi di sekitar embung itu, selain itu Pemerintah akan menerapkan teknologi padi Jarwo Super di wilayah Indonesia lainnya untuk bisa melipatgandakan hasil produksi beras dalam negeri” ujar Presiden.

Kunjungan Presiden dilanjutkan ke area Gelar Inovasi Teknologi Pertanian seluas 16 hektare di Kompleks Pemerintah Kabupaten Boyolali. Pada area tersebut ditampilkan pertanian komoditas perkebunan, sayuran, dan buah dengan implementasi inovasi pertanian dalam menghadapi perubahan iklim.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan di era perubahan iklim, peran pertanian terlebih sektor pangan sangat strategis. Sektor pertanian sebagai penyedia

pangan dan bahan baku pengolahan perlu mendapatkan perhatian. Walaupun sektor pertanian sebagai penyangga pangan dunia, namun hampir semua usaha tani rentan terhadap perubahan iklim.

“Di Indonesia, perubahan iklim seperti kondisi kekeringan akibat El Nino yang cukup kuat tahun 2015 menyebabkan kebakaran hutan dan lahan gambut. Oleh karena itu, perubahan iklim merupakan salah satu ancaman serius terhadap ketahanan pangan yang harus disikapi secara bijak. Perubahan iklim berdampak besar pada kerawanan pangan. Mengantisipasi ancaman kerawanan pangan, Kementan telah melakukan beberapa Program Upaya Khusus” kata Mentan.

Mentan mengatakan, selama dua tahun berturut-turut Indonesia dilanda elnino dan elnina yang menjadi tantangan sangat berat. Namun dengan kerja keras, stok beras tahun 2016 cukup aman, setidaknya terdapat 2 juta ton cadangan beras dan cukup sampai Mei tahun depan. Sementara Maret mendatang Indonesia juga sudah masuk puncak panen kembali.

Mentan menegaskan, perubahan iklim yang terjadi saat sekarang harus diantisipasi dengan bergerak lebih cepat. Kondisi itu tidak lepas dari upaya menghilangkan semua regulasi yang menghambat pencapaian swasembada pangan. Cukup banyak regulasi yang dibongkar, termasuk sistem tender yang lebih cepat.

“Kami telah memangkas berbagai

regulasi yang menghambat upaya swasembada pangan. Selanjutnya merehabilitasi 31 juta hektar infrastruktur pertanian yang rusak, yang diberikan oleh Presiden adalah 3 tahun namun bisa diselesaikan setahun saja” tegas Mentan

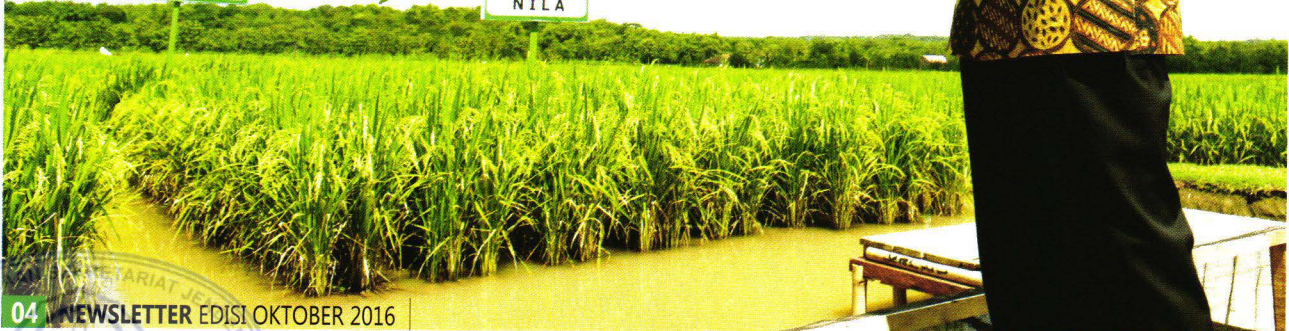
Mentan menyatakan Kementan optimis berjuang untuk swasembada pangan lewat momen kegiatan HPS, Kementan telah mengawali dengan Upaya Khusus dalam pencapaian swasembada pangan khususnya padi dan jagung yang telah memperoleh hasil yang menggembirakan dan akan dilanjutkan dengan upaya menuju swasembada daging sapi dengan adanya program UPSUS SIWAB (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting).

Begitu pula dengan bantuan Alsintan, ditingkatkan hingga 2000 persen dari efisiensi biaya seremonial, seminar, maupun perjalanan dinas yang mencapai triliunan. Bantuan Alsintan tersebut untuk menurunkan biaya produksi pertanian yang biasanya mencapai Rp 2 juta/hektare bisa ditekan menjadi Rp 1 juta/hektare.

Di samping itu, Kementan akan membangun lumbung pangan di daerah perbatasan. Tahun 2017, ditargetkan daerah-daerah perbatasan, seperti di Kepulauan Riau, Entikong (Kalbar), NTT, Maluku, juga Papua, sudah mulai menanam komoditas organik. Hal ini bertujuan untuk menyangga kebutuhan pangan domestik juga mendukung ekspor ke negara sahabat terdekat, seperti Singapura, Malaysia, Filipina, juga Papua Nugini.

DISPLAY TEKNOLOGI
MINAPADI
JAR LEGOWO SUPER
PADI + NILA
PADI + LELE
Tanjung Sari, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Boyolali

MINAPADI
INPARI 33
+ NILA



Maksimalkan Potensi Sapi Indukan Kementan Lakukan UPSUS SIWAB

"Upsus Siwab akan memaksimalkan potensi sapi indukan di dalam negeri untuk dapat terus menghasilkan pedet. Program tersebut menjadi fokus Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada 2017 mendatang. Upaya itu dilakukan sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mengejar swasembada sapi yang ditargetkan tercapai pada 2026 mendatang"

Guna mengakselerasi percepatan pemenuhan target pertumbuhan populasi sapi potong di dalam negeri, Kementerian Pertanian secara resmi meluncurkan program Upaya Khusus (Upsus) Percepatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting (Siwab) di Jawa Timur. Upsus tersebut mencakup dua program utama yakni peningkatan populasi melalui inseminasi buatan (IB) dan intensifikasi kawin alam. Program tersebut dituangkan dalam peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 48/Permentan/PK.210/10/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting tersebut ditandatangani Menteri Pertanian pada 3 Oktober 2016.

"Upaya ini dilakukan sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mengejar swasembada sapi yang ditargetkan Presiden Joko Widodo tercapai pada 2026 mendatang, mewujudkan Indonesia yang mandiri dalam pemenuhan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat, Upsus Siwab akan memaksimalkan potensi sapi indukan di dalam negeri untuk dapat terus menghasilkan pedet. Program ini pun menjadi fokus Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada 2017 mendatang" kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman, saat membuka program Upsus Siwab di kawasan Waduk Gondang, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur (8/10).

Mentan menjelaskan Upsus Siwab akan memaksimalkan potensi sapi indukan di dalam negeri untuk dapat terus menghasilkan pedet atau anak sapi. Upsus Siwab dilakukan untuk mencanangkan kebuntingan ternak sapi pada tahun 2017 mendatang. Dengan dilakukan Upsus Siwab diharapkan ke depannya akan ada 3 juta ternak Bunting

pada 2017 mendatang.

"Yang terpenting sekarang adalah bagaimana meningkatkan produksi dengan inseminasi buatan. Tahun lalu saja, dari dua juta sapi yang diprogramkan, ada penambahan 1,4 juta ekor anakan dari 2 juta yang di-IB. Tahun ini kami menyusun target empat juta ekor betina produktif yang akan diberikan IB, mudah-mudahan bisa ada tiga juta kelahiran baru," jelas Mentan.

Mentan menyebutkan program Upsus Siwab akan memantau secara fokus jumlah sapi betina bunting dan pedet yang lahir, maupun sapi betina yang mengalami gangguan reproduksi didukung peningkatan kualitas pakan ternak, kesehatan hewan, rumah potong hewan (RPH), logistik dan sarana pendukung lainnya.

Dihadapan peternak saat temu wicara panen pedet, Mentan mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 1 triliun untuk inseminasi buatan bagi para peternak. Mentan pun berjanji akan perhatian permasalahan dihadapi peternak, dari berbagai problema peternakan yang selama ini terjadi adalah pasokan pakan seperti jagung. Seperti telah diketahui bahwa pemerintah sangat berkonsentrasi terhadap permasalahan pakan, dimana sebelumnya Kementan telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama 44 kepala dinas sebagai penunjang ketersediaan pakan.

Selain acara Pencanaan Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab), dilakukan pula panen 5000 ekor pedet se-Jawa Timur dimana 2000 pedet tersebut adalah pedet dari peternak Lamongan. Mentan selaku pemrakarsa Panen pedet terbanyak hasil dari iseminasi buatan. berkesempatan melakukan inseminasi buatan ke ternak



Mentan Amran Sulaiman, memberi sambutan saat membuka program Upsus Siwab di kawasan Waduk Gondang, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur

sapi yang berada di lokasi acara di Waduk Gondang Lamongan. Inseminasi buatan tersebut secara serentak dilakukan ke 5000 ternak sapi.

Dalam peluncuran Upsus Siwab di Lamongan selain Mentan, hadir pula Menteri Perdagangan, Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, Menteri Koperasi dan UMKM, Anggota Komisi IV DPR RI, Gubernur Jawa Timur, Bupati Lamongan, Wantimpres, Wakil Pemred Kompas dan para Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa, Kabupaten dan Provinsi, beberapa pejabat pusat dan daerah serta para peternak. Rangkaian acara Panen pedet hasil IB tahun 2016 sekaligus pencanangan Upsus Siwab merupakan bentuk percepatan peningkatan populasi sapi kerbau menuju ketahanan pangan hewani untuk tercapainya swasembada ternak.

Hal yang penting lainnya, untuk pertama kali rekor MURI diserahkan kepada Menteri Pertanian atas Rekor Panen Pedet Terbanyak (4000 ekor pedet) diserahkan oleh Yayasan MURI dan sebagai bentuk kepedulian terhadap kinerja peternak kementan memberikan beberapa penghargaan dari Menteri Pertanian kepada peternak dan petugas yang berprestasi dalam peternakan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Upsus Siwab Syukur Iwantoro menyebutkan Upsus Siwab bukanlah gebrakan pertama yang dilakukan Kementan untuk meningkatkan populasi sapi. Sebelumnya, pada 2014, program Gertak Birahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) dilakukan dan mampu menambah populasi anak sapi lebih dari 1 juta ekor pada 2015. Berdasarkan Sensus Peternakan 2013 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat populasi sapi dan kerbau sebanyak 14,3 juta ekor.



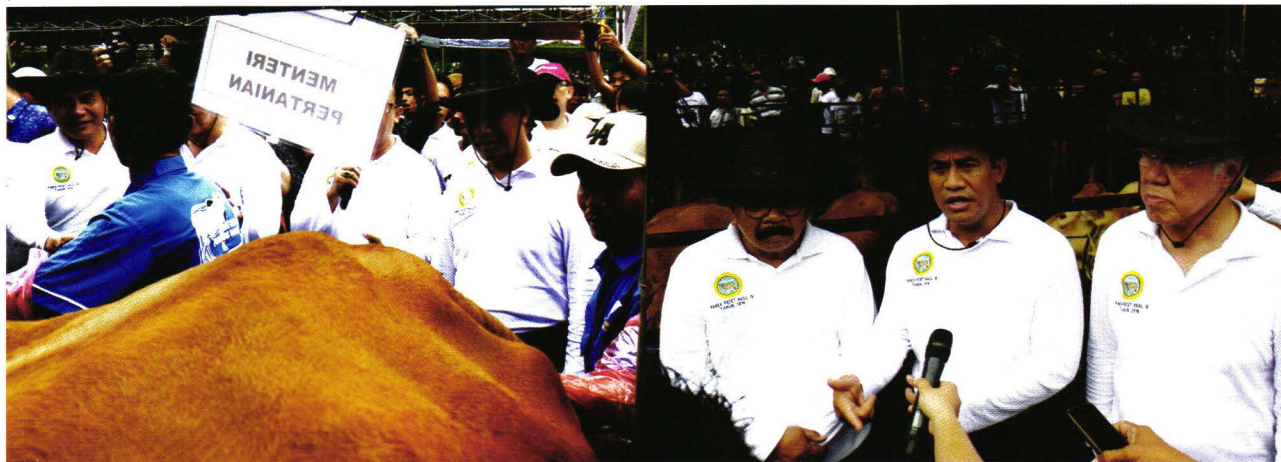
Secara rinci, data Direktorat Jenderal (Ditjen) Peternakan dan Kesehatan Hewan menyebutkan, pada 2016, populasi sapi potong yaitu 13,59 juta ekor, sapi perah 472.000 ekor, dan kerbau 1,12 juta ekor. Data Ditjen PKH menunjukkan total populasi sapi dan kerbau betina dewasa saat ini mencapai 5,62 juta ekor. Sebesar 71,76 persen atau setara 4,03 juta ekor merupakan betina produktif.

Terkait program intensifikasi kawin alam, Ketua Upsus Siwab menerangkan pemerintah akan menyiapkan

infrastruktur yaitu 5 juta bibit pakan rumput dan legum, prasarana sumber air berupa embung-embung, serta obat-obatan dan vaksin. Lalu, untuk ternak yang dikembangkan dengan pola kandang, pemerintah akan memberikan 5 juta bibit pakan rumput dan legum, fasilitas kesehatan, 5,28 juta semen beku, dan tenaga inseminator. Untuk keseluruhan program Upsus Siwab, Kementan menggelontorkan dana hingga Rp1,1 triliun.

"Ini dilakukan bagi ternak yang

dikembangkan di padang gembala (ranch) sehingga ada jaminan ketersediaan pakan, air, dan kesehatan ternak. Nanti daerah dengan ranch seperti NTT dan NTB, akan kita bangun prasarana sumber air sehingga lahannya yang cenderung kering menjadi lebih subur, sehingga pakan tersedia sepanjang tahun. Model pembangunan embung di lahan kering ini seperti yang dilakukan oleh peternak padang gembala di Brasil," ujar Ketua Upsus Siwab.



Mentan : "Sudah Saatnya Daerah Perbatasan Jadi Lumbung Padi"

"Kementan ingin daerah perbatasan di Kalbar dapat swasembada pangan. Sudah saatnya daerah perbatasan di Kalbar menjadi lumbung padi karena memiliki potensi yang besar untuk pengembangan pertanian padi di perbatasan sehingga dapat mandiri pangan dan menjadi salah satu sentra ekspor pangan"



Mentan Andi Amran Sulaiman saat penanaman perdana padi teknik hazton di Kecamatan Entikong, Sanggau Kalbar

Kementerian Pertanian mendorong Kalimantan Barat untuk menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang mandiri pangan dan bisa menjadi pengekspor bahan pangan terutama beras. Apalagi Kalimantan Barat memiliki wilayah luas untuk lahan pertanian dan terbukti pada tahun 2015 sudah surplus 300 ribu ton beras. Menteri Pertanian juga menargetkan daerah perbatasan di Kalimantan Barat harus menjadi daerah lumbung padi.

"Kita dorong Kalbar dapat mandiri pangan dan menjadi salah satu sentra ekspor pangan ke negara tetangga Malaysia, kita ingin swasembada pangan di Kalbar, Saatnya daerah perbatasan menjadi

lumbung padi. Kita memiliki potensi yang besar untuk pengembangan pertanian padi di perbatasan" kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat penanaman perdana padi teknik hazton di Kecamatan Entikong, Sanggau Kalbar, (22/10).

Acara tanam perdana padi dengan teknik hazton yang dihadiri anggota DPR RI Komisi IV dan IX, Gubernur Kalbar, Bupati Sanggau dan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintahan Provinsi Kalbar, merupakan rangkaian program membangun lumbung pangan di kawasan perbatasan bertujuan untuk menciptakan hasil produksi padi di perbatasan dapat besar sehingga bisa diekspor.

Mentan memaparkan saat sekarang pihak Kementan peduli pembangunan pertanian dan pangan di perbatasan

lantaran hal itu sudah sesuai sembilan tujuan (Nawacita) Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres M. Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

"Presiden Jokowi ingin membangun negara ini dari pinggiran, termasuk di daerah perbatasan di Kalimantan Barat. Kita dari Kementerian Pertanian akan mendorong dan mendukung kebutuhan masyarakat di sini," papar Mentan.

Mentan memuji tanam padi dengan teknologi hazton yang ditemukan pemerintah provinsi Kalbar, Teknologi hazton sudah menasional, karena teknik tanamnya mencapai 20 bibit jadi sulit diserang hama, metode hazton juga sudah diujicoba di Jawa Barat dan Jawa Tengah, dan hasilnya meningkat 400 persen. Di Kalbar ada dua jenis beras yang diminati negara tetangga seperti

Malaysia, yakni beras merah pelawang dan raja uncah Saat sekarang bagaimana dua jenis beras itu dikembangkan dengan teknis hazton agar produktivitas tinggi.

"Kita harus bahu membahu meningkatkan produksi pangan, karena perbatasan sangat jelas pasarnya. Saat ini Kalbar sudah swasembada padi dan harapannya di daerah perbatasan juga surplus. Apalagi ada teknologi hazton yang merupakan hasil karya anak Kalbar yang bisa meningkatkan produktivitas lebih dari dua kali lipat. Saya dorong juga dalam pengelolannya dengan pertanian organik sebab harganya akan lebih mahal 10 kali lipat. Para petani agar terus meningkatkan masa tanam yang semula satu kali menjadi dua kali dalam setahun"ucap Mentan

Untuk mencapai target Kalimantan Barat dapat mandiri pangan, Mentan mengungkapkan akan memperluas lahan pertanian dan membantu bibit serta pemberdayaan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA). Mentan memastikan program mina padi yang diterapkan di kabupaten Landak, Kalimantan Barat, bisa menggandakan keuntungan petani.

"Teknologi mina padi adalah keuntungan ganda, belum lagi hasil padi yang ditanam dengan teknologi haszton, dan target

lahan pertanian minimal 5000 hektar, tahun lalu kurang karena permasalahan area hutan, tapi kita sudah telpon Menteri Kehutanan Insha Allah bisa dikabulkan alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian," ungkap Mentan.

Pada kesempatan itu Mentan juga menerangkan rencana dan target pemerintah dalam hal ketahanan pangan nasional, dimana dalam 30 tahun ke depan Indonesia harus menjadi negara nomor satu pengekspor beras di dunia. Kalimantan Barat saat sekarang surplus beras sudah selayaknya melakukan ekspor ke Negeri Jiran Malaysia. Apalagi, peluang ekspor ke Malaysia sangat besar karena dari kebutuhan berasnya 2,5 juta ton per tahun yang sejuta ton mereka impor dari Pakistan, Thailand dan lainnya.

"Sudah saatnya justru Kalbar menjadi daerah yang mengekspor beras. Bila perlu katanya negara jiran seperti Malaysia dan Singapura dibanjiri beras dari Kalbar.Semua siap menjadikan Kalbar lumbung beras dan mengekspor barang?. Kita pasti bisa. Pada tahap awal kita harus menjadi pengekspor beras di Asia dan kemudian menjadi nomor satu di dunia karena potensi kita dan SDA kita ada dan luas. Semua tidak ada kata tidak mungkin, Kita harus kerja keras karena itulah kunci kita bisa maju. Petani jaya

maka kita maju" terang Mentan.

Mentan menyebutkan Kalbar telah ekspor beras tetapi belum tercatat. Ekspor yang tidak tercatat itu harus segera tercatat agar terdata berapa yang diekspor ke negara tetangga dan produksi lokal. Saat sekarang beberapa daerah perbatasan sedikitnya telah mensuplai negara tetangganya..

"Sekarang Kalbar sudah dapat ekspor beras yang menyeberang ke Malaysia. Ini harus dicatat besarnya jumlahnya, kemudian NTT juga telah mensuplai Timor Leste, Maluku ke Filipina, paling timur Marauke sudah pula mengirim beras ke Papua.," ujar Mentan.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IV Daniel Johan mengatakan, Kalbar baru bisa memproduksi beras raja uncah sekitar 500 ton, sedangkan jumlah kebutuhan Malaysia sekitar 2.000 ton.

"Kebutuhannya 2.000-an ton. Kita baru bisa memproduksi 500 ton, baru seperempatnya karena memang tidak gampang meyakinkan petani, dia takut enggak laku karena itu untuk diekspor harus ada penyuluhan," kata Wakil Ketua Komisi IV.



Pemerintah Berencana Bangun Embung Di Seluruh Indonesia

"Pemerintah berencana membangun embung-embung, long storage di seluruh Indonesia sekitar 3,9 juta ha. Rencana membangun embung tersebut berdasarkan fakta bahwa lahan-lahan atau areal tadah hujan hanya dimanfaatkan selama musim hujan saja. Pembangunan embung dan long storage bertujuan untuk memberikan air yang cukup bagi para lahan sawah yang selama ini hanya mengandalkan air dari hujan"



Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendapat arahan dari Bapak Presiden di kompleks Istana Kepresidenan.

Untuk memaksimalkan produksi pangan pada sawah-sawah tadah hujan di seluruh daerah Indonesia, Pemerintah Indonesia berencana akan membangun jutaan hektare embung. Proyek pembangunan embung-embung tersebut akan dilaksanakan tahun 2017. Presiden menugaskan Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

"Baru saja kami mendapat arahan dari Bapak Presiden sehubungan dengan irigasi. Untuk irigasi, kami rencana membangun embung-embung, long storage di seluruh Indonesia yaitu areanya kurang lebih 3,9 juta hektare. Insya Allah tahun depan dimulai," kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman usai rapat di Istana Kepresidenan. (11/10).

Menurut Mentan, rencana membangun embung tersebut berdasarkan fakta bahwa lahan-lahan atau areal tadah hujan hanya dimanfaatkan selama musim hujan saja. Selama ini, lahan pertanian yang hanya mengandalkan hujan hanya berproduksi selama atau sepanjang musim hujan saja, jika masuk musim kemarau tidak berproduksi. Pembangunan embung dan long storage bertujuan untuk memberikan air yang cukup bagi lahan sawah yang selama ini hanya mengandalkan air dari hujan (tadah hujan).

"Ketika musim kering datang, aktivitas para petani berkurang drastis karena kekurangan air. Enam bulan di saat musim kering ini petaninya tidur, lahannya tidur. Kita bangunkan dengan membangun embung-embung, Sawah tadah hujan yang selama ini hanya produktif enam bulan dalam setahun. Dengan adanya embung tersebut diharapkan sawah tadah hujan bisa berproduksi dua



kali dalam setahun. Kementan akan bersinergi dengan Kemen-PUPR, Kemen-BUMN, Kemendes dan PDT dan Kemendag. Itu kita rancang untuk tahun depan," kata Mentan.

Lebih lanjut Mentan menjelaskan, bahwa untuk proyek pembangunan embung-embung tersebut dibutuhkan dana puluhan triliun. Anggarannya dari APBN.

"Total dana yang dibutuhkan sekitar Rp22 triliun, yang berasal dari APBN 2017 untuk Kementan, Kemen-PUPR, Kemendes dan PDT" jelas Mentan.

Mentan mengungkapkan lokasi pembangunan embung nantinya di daerah tadah hujan yang sekitar empat juta hektare. Area sawah tadah hujan tersebut ada diberbagai daerah Di Pulau Jawa ada sekitar satu juta hektare yang tidak ada irigasi teknisnya. Selain itu di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Pembangunan embung akan menyebar di 3,9 juta hektare lahan tadah hujan di seluruh Indonesia, termasuk Papua dan Indonesia Timur lainnya. Targetnya, seluruh pembangunan selesai dalam dua tahun.

"Pasca tahun 2019 indeks pertanian

diperkirakan akan naik drastis seiring dengan peningkatan cadangan air dan produktivitas petani. Katakanlah kalau embung seluas 2 juta ha berhasil, artinya sama dengan kita membangun sawah 2 juta hektare. Karena biasanya sawah yang tidak produktif selama enam bulan. Maka dengan adanya pasokan air dari embung jadi akan ada kehidupan karena ada air maka padi bisa tumbuh, juga ada jagung, kedelai, juga membantu peternakan ayam, kerbau, sapi dan lainnya," ungkap Mentan.

Terkait berapa target peningkatan produksi beras yang akan dicapai, Mentan mengatakan pembangunan embung menyangkut indeks pertanian yang biasanya tanam sekali dalam setahun menjadi dua kali.

"Karena sudah tidak ada masa tidak produktif selama enam bulan, maka empat juta hektare sawah bisa dimaksimalkan menjadi dua kali panen, artinya sama dengan memanen sawah dua juta hektare dua kali dalam setahun" kata Mentan.

Mengingat pembangunan infrastruktur pertanian seperti dengan membangun embung di seluruh Indonesia memang

sangat vital, Pembangunan infrastruktur tidak bisa hanya *by project*. Tetapi harus proyek berkesinambungan dan holistik. Rencana pemerintah menggelontorkan dana 22 triliun rupiah untuk membangunkan 4 juta hektare (ha) lahan tidur pada 2017 perlu diikuti oleh program lain yang lebih

mendasar, seperti mempercepat pendirian Badan Pangan.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pangan. Kebutuhan Kelembagaan pertanian yang kuat, dalam UU Pangan disebut sebagai Badan Pangan yang punya otoritas menyeluruh

baik pertanian maupun perdagangan pangan sangat diperlukan. Kebijakan pangan dapat diharapkan bisa maksimal kalau terintegrasi dengan perdagangan pangan. Sebab, pangan sangat terkait dengan masa panen dan masa paceklik yang perlu pengaturan secara nasional.



Mentan, Andi Amran Sulaiman usai menghadiri Dua Tahun Kerja Nyata Jokowi-JK di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Kepresidenan di Jakarta.

Spirit Bagi Kementan Untuk Wujudkan Kedaulatan Pangan

"Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla genap berusia dua tahun. Pembangunan sektor pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan menjadi salah satu tujuan dan target utama pemerintahan Jokowi - JK dan dimasukkan dalam Agenda Nawacita memberikan spirit baru bagi Kementerian Pertanian untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan Indonesia"

Dalam masa lima tahun pemerintahan Jokowi-JK, Kementerian Pertanian bertekad mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan dimaknai sebagai pemenuhan melalui produksi lokal. Di dalamnya menyangkut pemenuhan hak atas pangan berkualitas, bergizi baik, dan sesuai budaya, yang diproduksi dengan sistem pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pembangunan sektor pertanian di bidang pangan menjadi salah satu tujuan utama pemerintahan Jokowi-JK dan dimasukkan dalam Agenda Nawacita. Meski belum sempurna, sedikit demi sedikit tujuan pembangunan pertanian era Pemerintahan Jokowi-JK mulai tercapai. Hal itu setidaknya terlihat dari indikasi produksi pangan.

Pada 2015, mengacu pada angka tetap (ATAP) yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi mencapai 75,55 juta ton gabah kering giling (GKG). Kenaikan produksi karena naiknya luas panen seluas 0,51 juta hektare (3,71%) dan kenaikan produktivitas 1,45 kuintal/ha (2,82%). Di Pulau Jawa naik 1,83 juta ton dan di luar Jawa 2,88 juta ton. Angka itu bukan saja lebih tinggi dari target dalam Rencana Strategis 2015-2019 yang menulis 73,40 juta ton GKG untuk 2015, namun juga produksi paling tinggi dalam 10 tahun terakhir. Apabila melihat capaian produksi 2010-2014, capaian itu memang patut diapresiasi. Pada 2010, produksi hanya 66,47 juta ton GKG, pada 2011 sebesar 65,76 juta ton GKG, 2012 sebesar 69,06 juta ton GKG, 2013 sebesar 71,28 juta ton GKG,



dan 2014 sebesar 70,25 juta ton GKG. Kenaikan produksi pada 2015 tersebut diyakini berlanjut pada tahun 2016.

Fenomena La Nina yang terjadi sejumlah sentra padi di Tanah Air justru menjadi berkah bagi Tanaman pangan terutama padi karena areal tanam menjadi lebih luas. Kementerian Pertanian memasang target produksi padi tahun 2016 sebesar 75,13 juta ton GKG, sebelumnya dalam Rencana Strategis 2015-2018 dipatok 76,20 juta ton GKG. Sepanjang Januari-Juli 2016, produksi padi telah tembus 51,69 juta ton GKG.

"Upaya mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik seperti Nawacita ketujuh yang dicanangkan pemerintah menitikberatkan pada upaya mewujudkan Kedaulatan

pangan dan mensejahterakan petani. Melalui visi tersebut, pemerintah menegaskan komitmen dan perhatian serius pada sektor pertanian" kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat acara Dua Tahun Kerja Nyata Jokowi-JK di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Kepresidenan di Jakarta, (21/10).

Komitmen itu oleh Kementerian Pertanian dituangkan dalam kebijakan strategis dan program hulu - hilir. Kebijakan itu adalah meningkatkan produksi komoditas strategis yang menguasai hajat hidup masyarakat Indonesia, baik dari sisi produksi dalam hal ini pemberdayaan petani (farmers empowering) maupun kepuasan konsumen (consumers satisfaction). Lalu, menekan biaya produksi per satuan,



luas komoditas strategis tersebut dan melakukan pengendalian harga.

Untuk mencapai sasaran itu, Mentan menyebutkan pihak Kementan melaksanakan Program Upaya Khusus (Upsus) peningkatan produksi. Target Swasembada pangan difokuskan pada padi, jagung, kedelai, gula, bawang merah, Daging, cabai, kakao, karet, kopi, dan kelapa sawit. Tetapi untuk mewujudkan Kedaulatan pangan dan Kesejahteraan petani tidaklah mudah..

Mentan mengakui, upaya peningkatan produksi dan pengendalian harga dihadapkan pada berbagai faktor penghambat, di antaranya anomali perubahan iklim, jaringan irigasi rusak, kepemilikan lahan petani yang sempit, dan Teknologi Pertanian yang belum siap dimanfaatkan, serta adanya intervensi kepentingan pihak-pihak tertentu di hilir.

Pihak Kementan optimistis dapat mewujudkan Kedaulatan pangan dan Kesejahteraan petani tersebut. Oleh karena itu Mentan mengeluarkan kebijakan yang mampu mengubah wajah pertanian yang lama ke pertanian yang maju dan modern, serta jaminan Kesejahteraan petani. Kebijakan itu sering dianggap kontroversial, namun kebijakan yang diterapkan saat sekarang merupakan sebuah radikalisme paradigma dalam meletakkan posisi penting sektor pertanian dalam pembangunan nasional. Karena itu pula, Kementan juga menegakkan perlawanan atas praktik kartel pangan yang terbukti memiskinkan petani, sekaligus merugikan konsumen.

Menurut Mentan, Kementan telah mengubah regulasi dari tender menjadi penunjukan langsung (PL), perbaikan infrastruktur irigasi pada 3 juta hektare (ha) sawah dan pemberian bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) 180 ribu unit, peningkatan penanganan on farm dan pascapanen, perbaikan Tata niaga dengan memotong rantai pasok yang terlalu panjang dari sembilan menjadi tiga. Kementan juga melakukan peningkatan investasi dan hilirisasi, serta mengendalikan impor dan mendorong ekspor pangan.

Mentan menerangkan kebijakan hulu-hilir tersebut, akhirnya sukses meningkatkan produksi pangan. Selain peningkatan produksi padi pada 2015 yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir, ekspor pangan juga meningkat. Ekspor padi, jagung, kedelai, bawang merah, dan cabai pada 2015 mencapai 290.035 ton, sedangkan pada 2014 hanya sebesar 115.617 ton. Artinya, sangat jelas terlihat upaya pemerintah untuk mewujudkan Kedaulatan pangan mempunyai perkembangan yang signifikan.

Di sisi petani, Kementan bersama lembaga terkait fokus menekan biaya produksi dan pengendalian harga produksi. Untuk menekan biaya produksi, berbagai kebijakan telah diluncurkan, seperti pengadaan infrastruktur, Alsintan, serta subsidi benih dan pupuk. Lalu, bersama Perum Bulog dan Kementerian Perdagangan telah ditetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) dan harga referensi (*floorprice* dan *ceiling price*) melalui Permendag No 63 Tahun 2016 yang diimplementasikan melalui operasi pasar (OP) di Toko Tani Indonesia

(TTI), Rumah Pangan Kita (RPK), dan intervensi di pasar becek.

Mentan menjelaskan kedua kebijakan itu berhasil mendorong Kesejahteraan petani. Terbukti, Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) pada 2015 meningkat dibandingkan 2014. NTUP 2015 mencapai 107,45, sedangkan 2014 hanya 106,05 dan pada September 2016 terpantau naik mencapai 109,76. NTUP mengindikasikan kemampuan petani untuk membeli input produksi dan tingkat Kesejahteraan petani.

Kementan juga meluncurkan program Asuransi pertanian yang akan menjamin Kesejahteraan petani mana kala terjadi gagal panen akibat bencana. Pemerintah mensubsidi premi yang harus dibayar petani sebesar Rp 144 ribu per ha per musim tanam (MT) sehingga petani hanya membayar Rp 36 ribu per ha per MT. Sedangkan nilai klaim yang diterima petani sebesar Rp 6 juta per ha per MT.

Keberhasilan program pertanian saat sekarang telah mampu meningkatkan Ketahanan Pangan Indonesia dibanding negara lain. Dalam data *The Economist Intelligence Unit* yang menunjukkan indeks Ketahanan Pangan global atau *Global Food Security Index* (GFSI) tahun 2016, posisi Indonesia meningkat dari peringkat ke 74 menjadi ke 71 dari 113 negara. Pencapaian tersebut mengindikasikan perhatian besar yang diberikan pemerintah di sektor pertanian, termasuk pemberdayaan petani. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami perubahan terbesar pada indeks keseluruhan (2.7).



Untuk Tingkatkan Indeks Pertanian Kementan Targetkan Pembangunan Sumber Air

"Pembangunan dan perbaikan sumber air di lahan sawah seluruh Indonesia ditargetkan rampung pada 2018 demi meningkatkan indeks pertanian dan produktivitas pangan. Dengan peningkatan indeks pertanian, produktivitas tanam pun akan bertambah sehingga penghasilan petani ikut melonjak dan semakin sejahtera"

Pemerintah Indonesia terus menggenjot produksi pangan nasional, salah satu langkah yang dilakukan adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya air. Menteri Pertanian bersama Wakil Presiden RI berdiskusi mengenai pengembangan

sumber air untuk mengoptimalkan lahan pertanian yang terbengkalai.

"Jadi arahan Presiden dan Wapres, Insya Allah tahun depan kami fokus pada sumber-sumber air. Fokus utamanya pada lahan tidur yang selama ini tak bisa berproduksi karena tak mendapat pasokan air," kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman usai bertemu Wakil

Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres (4/10).

Mentan menjelaskan saat sekarang dari semua lahan yang dijadikan sawah di seluruh Indonesia. Tetapi, hampir separuh dari lahan itu terbengkalai dalam waktu lama. Tak adanya lahan membuat petani menganggur selama enam bulan. Jika 6 bulan lahan padi tidak dipergunakan,

maka selama 6 bulan petani tidak memiliki aktivitas pertanian. Dua duanya tidur selama enam bulan.

"Kita harus bangun kedua-duanya baik lahan dan petaninya, tahun depan kita fokuskan pada sumber-sumber air. Kita memiliki lahan khususnya lahan sawah, luasnya 8,1 juta hektar seluruh Indonesia tetapi separuh yaitu kurang lebih 4 juta hektar 6 bulan tidur karena tidak ada sumber air itu adalah lahan tadah hujan," jelas Mentan.

Mentan menerangkan kurang lebih 4 juta ha lahan tidur selama 6 bulan karena tidak ada sumber air, itu adalah lahan tadah hujan, Pemerintah berniat membangun lahan tadah hujan ini. Salah satunya dengan membuat embung dan pengairan yang pantas. Pemerintah akan membangun beberapa embung untuk mengairi 4 juta lahan padi yang ada di seluruh Indonesia. Embung adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di satu kawasan. Cara kerjanya mirip dengan bendungan namun dengan ukuran yang lebih kecil.

"Langkah yang diambil pemerintah dengan menyiapkan embung dan kemudian long storage yang dihubungkan dengan sumur dangkal dan sumur dalam. Kemudian pompanisasi pada sungai-sungai yang ada di sekitarnya ini kita bisa meningkatkan indeks pertanaman satu kali. Minimal setengah dari empat juta. Nah ini pendekatannya nanti adalah kesejahteraan petani meningkat. Kita siapkan kita bangun lahan tidur petani tidur di saat kemarau. Itu konsepnya. Karena kita menyiapkan air sepanjang tahun. Itu inti keinginan pemerintah. Diperkirakan proses pembangunan embung akan selesai dalam dua tahun atau pada 2018 mendatang" terang Mentan.

Mentan mengungkapkan pembangunan dan perbaikan sumber air di lahan sawah seluruh Indonesia ditargetkan rampung pada tahun 2018 untuk meningkatkan indeks pertanaman dan produktivitas pangan. Indeks pertanaman yang dimaksudkan adalah memaksimalkan penggunaan lahan kering yang tadinya hanya dilakukan satu kali dalam setahun, kemudian menjadi dua kali dalam setahun. Petani bisa meningkatkan indeks pertanian satu kali, minimal setengah dari empat juta (ha). Kementan menargetkan kalau bisa dua tahun selesai

"2018 targetnya. Tujuannya, tentu meningkatkan indeks pertanaman menjadi dua kali lipat terhadap minimal 2 juta hektar, atau separuh dari lahan tidur yang ada. Dengan peningkatan indeks pertanaman, produktivitas tanampun



akan bertambah sehingga penghasilan petani ikut melonjak dan semakin sejahtera. Di 2016, Kementan telah membangun embung di Bojonegoro, serta menyediakan pompa yang tersebar di sepanjang Sungai Bengawan Solo dan Cimanuk. Hasilnya, pada musim kemarau Elnino, sekitar 10.000 hektar lebih sawah selamat dan berproduksi'ungkap Mentan.

Menurut Mentan, selain embung, Pemerintah berencana membangun tempat penyimpanan dan sumur di sekitar lahan pertanian. Pemerintah juga berencana memanfaatkan aliran sungai yang ada di sekitar lahan yang tidur tadi. Pemerintah tak ingin menyia-nyiaakan lahan yang tertidur.

"Pemerintah akan fokus untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan produksi pangan. Kita siapkan, kita bangun lahan tidur petani saat kemarau, itu konsepnya. Salah satu program utama pemerintah adalah meningkatkan indeks produktifitas pertanaman" ujar Mentan.

Mentan mensimulasikan dengan tanam padi di 500 ribu ha saja masih kurang. Rata-rata satu tiap hektare menghasilkan enam ton gabah sehingga total produksi sekitar 3 juta ton. Berasnya diperkirakan setengahnya saja atau sekitar 1,5 juta ton.

Mentan menganggap fenomena La Nina yang berlangsung di Indonesia sebagai berkah. Sebab, ada kenaikan pengairan terhadap luas lahan pertanian. Tiga bulan terakhir ada kenaikan kurang-lebih satu juta hektare dibanding tahun sebelumnya.

"La Nina datang pada Juli saat pertanian butuh air karena musim kemarau. Kehadiran La Nina otomatis membuat lahan pertanian tidak pernah kering. Ini berdampak pada luas lahan yang dialiri bertambah" kata Mentan.

Mentan memaparkan pada Juli tahun 2015, lahan yang teraliri hanya 600 ribu hektare, tahun ini sekitar satu juta hektare. Agustus tahun lalu, lahan yang dialiri sekitar 500 ribu hektare, tahun 2016 sekitar satu juta hektare. September

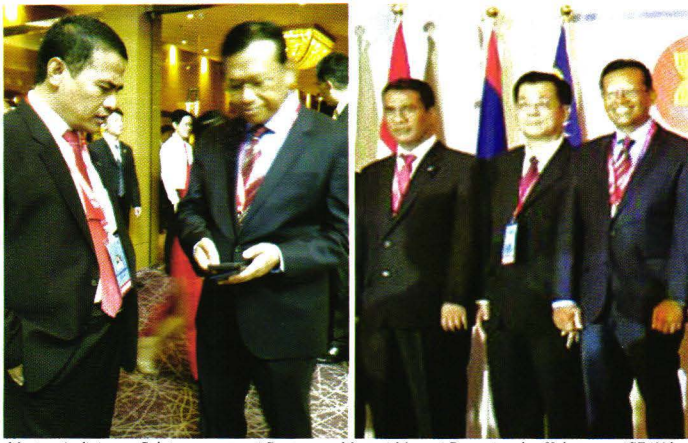
tahun 2015 sekitar 800 hektare, tahun 2016 yang dialiri 1,2 juta hektare.

Lebih lanjut Mentan menerangkan bahwa musim hujan yang lebih cepat dari biasanya dikhawatirkan mengganggu pasokan pangan khususnya produksi beras dalam negeri. Sebab, musim tanam bisa bergeser lebih awal dari biasanya. Kementerian Pertanian mulai mengantisipasinya dengan penyediaan air lewat embung dan mesin pompa.

"Musim paceklik diperkirakan pada Desember, Januari, dan Februari. Tiap tahun, Kementan berusaha mengubah musim paceklik itu menjadi tidak paceklik. Caranya dengan lakukan tanam di Juli, Agustus dan September, Tapi, pada tiga bulan tersebut rata-rata tanam hanya 1.000 hektare saja. Padahal kebutuhan ideal yang diperlukan adalah satu juta hektare" ucap Mentan.

Menurut Mentan, pertambahan luas lahan pengairan pada Juli - September tersebut juga menjadi antisipasi menghadapi musim paceklik. Musim paceklik, berlangsung pada Desember hingga Februari. Setiap tahun, Kementerian Pertanian berusaha mengubah musim paceklik menjadi tidak paceklik. Caranya adalah dengan mengoptimalkan musim tanam pada Juli hingga September. Jadi bulan di mana bulan - bulan defisit Kementan akan menambah tanam supaya paceklik hilang.

Mentan mengatakan ada sejumlah daerah yang akan diantisipasi perihal perubahan musim pada akhir tahun. Ada tujuh daerah yang menjadi lumbung pangan yang akan diantisipasi terkait dengan perubahan musim. Tujuh daerah tersebut adalah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, dan Kalimantan Selatan. Tujuh provinsi tersebut harus dijaga ketat. Kementan sudah instruksikan kepada tim agar mewaspadai kalau curah hujan meningkat.



Mentan Andi Amran Sulaiman saat usai Pertemuan Menteri Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN ke-38 di Singapura

Program Lumbung Pangan Di Perbatasan Bagian Konsep Besar Kementan

“Program pembangunan lumbung pangan di wilayah perbatasan merupakan bagian dari konsep besar Kementerian Pertanian yang tertuang dalam dokumen Grand-desain Pembangunan Pertanian Jangka Panjang dan Roadmap Pengembangan Komoditas Pertanian di Indonesia 2016-2045, dengan semangat “Indonesia Feed the World”

Langkah Kementerian Pertanian Indonesia untuk membangun lumbung pangan di wilayah perbatasan mendapat dukungan penuh dari tiga negara tetangga di Asia. Komitmen bersama itu mencuat dalam pertemuan Menteri-menteri Pertanian negara-negara ASEAN. Selain berupaya memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, ASEAN, dan dunia, program lumbung pangan daerah perbatasan juga merupakan solusi menghentikan impor pangan ilegal.

“Negara China, Singapore dan Malaysia mengapresiasi dan mendukung program membangun lumbung pangan di wilayah perbatasan NKRI. Ini merupakan peluang ekspor yang besar dengan menggerakkan perekonomian di wilayah perbatasan dengan mengelola potensi sumberdaya spesifik lokasi masing-masing” kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat usai Pertemuan Menteri Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN ke-38 di Singapura (5/10).

Mentan menjabarkan rencana program tersebut dimana wilayah perbatasan Provinsi Riau dan Kepulauan Riau nantinya akan memasok ke pasar Singapore dan Malaysia. Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara akan memasok pangan ke Sabah, Serawak dan Brunei. Wilayah perbatasan Provinsi Sulawesi Utara memasok pangan ke Philipina, Provinsi Papua memasok ke Negara Papua New Guinea, serta perbatasan Nusa Tenggara Timur memasok pangan ke Negara Timor Leste.

Program pembangunan lumbung pangan di wilayah perbatasan merupakan bagian dari konsep besar Kementerian Pertanian yang tertuang dalam dokumen Grand-desain Pembangunan Pertanian Jangka Panjang dan Roadmap Pengembangan Komoditas Pertanian di Indonesia 2016 - 2045, dengan

semangat “Indonesia Feed the World”. Kebijakan Kementerian Pertanian di wilayah perbatasan itu sejalan dengan arahan Presiden RI untuk “membangun dimulai dari pinggir secara sinergis.

Program Kementerian Pertanian tersebut di Indonesia akan dilaksanakan secara sinergis dengan menggandeng Kementerian PUPR, Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, badan Nasional Pembangunan Perbatasan, 42 Kabupaten/Walikota wilayah Perbatasan dan para Gubernur.

“Hingga saat ini importasi barang pangan ilegal di perbatasan sudah semakin tinggi. Banyak hal yang membuat maraknya importasi ilegal. Bermula dari ketiadaan bahan pangan di daerah perbatasan, hingga tawaran hasil pangan murah dari negara tetangga yang membuat importasi pangan ilegal tak terbendung. Di daerah perbatasan banyak jalur tikus tempat keluar dan masuknya barang ilegal ke tanah air. Di daerah perbatasan banyak mengonsumsi hasil pangan dari negara tetangga. Di daerah Kalimantan masyarakatnya mengonsumsi Cabai dari Malaysia, Beras, Bawang dan hasil pangan lainnya. Saat ini kita berupaya agar mereka bisa kembali mengonsumsi hasil pangan dari tanah air, Kementan, akan mengambil langkah cepat dan mengupayakan agar masalah ini harus segera diatasi dengan peningkatan produksi pangan di daerah perbatasan” ujar Mentan.

Mentan meyakini bahwa, pemerintah melalui program strategisnya akan memenangkan pertarungan di daerah perbatasan. Karena negara tetangga tersebut mendapatkan hasil pangan dengan langkah Impor dari negara Vietnam dan Myanmar, sementara Indonesia dari hasil lumbung sendiri,” ujarnya.

“Kemarin kami sudah melakukan langkah revisi anggaran, dimana target kami akan

membangun lumbung pangan 10 ribu hektar di daerah perbatasan Kepri, dan kami minta agar jalur tikus jangan di tutup karena berikutnya akan ada hasil pangan dari Indonesia masuk ke negara tetangga,” ujar Mentan.

Menurut Mentan, targetnya ke depan, Indonesia akan menjadi penyuplai negara-negara tetangga. Papua akan menyuplai Papua Nugini, Maluku akan menyuplai Filipina, Entikong akan menyuplai Malaysia, Kepulauan Riau (Kepri) akan menyuplai Singapura yang merupakan pangsa pasar yang cukup besar.

Di sela sela acara tersebut, Mentan Indonesia Indonesia juga mengadakan pembicaraan dengan Mentan Malaysia. Disepakati dalam waktu dekat, Delegasi Malaysia akan mengadakan kunjungan ke Indonesia untuk menundaklanjuti rencana tersebut dalam waktu dekat.

“Mereka sangat tertarik dan antusias pada rencana Indonesia mengembangkan lahan pertanian di kawasan perbatasan, Mentan Malaysia dan timnya akan ke Indonesia dalam waktu dekat untuk menindaklanjuti hasil pertemuan ASEAN di Singapura,” kata Mentan RI.

Lebih lanjut Mentan mengungkapkan bahwa Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia, menyatakan minatnya untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian di wilayah perbatasan RI - Malaysia, khususnya perbatasan Kalimantan Utara dengan Sabah dan Sarawak untuk mengembangkan beras organik dan buah-buahan seperti nanas.

“Komoditas pertanian yang akan dikembangkan adalah padi organik dan buah-buahan seperti nanas, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk mengembangkan komoditas pertanian dengan tahap awal adalah fokus pada wilayah yang infrastrukturnya sudah maju, dan selanjutnya pada wilayah-wilayah perbatasan dengan Malaysia”

Persediaan Pangan Nasional Masih Cukup Untuk Kebutuhan Masyarakat

"Persediaan pangan negara masih cukup untuk menutupi kebutuhan pangan masyarakat. Jika panen gabah per hektar mencapai 6 ton, maka produksi gabah nasional mencapai 6 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara 3 juta ton beras sehingga mencukupi kebutuhan masyarakat sebesar 2,6 juta ton beras per bulan"

Menghadapi pergantian musim, pihak Kementerian Pertanian menjamin persediaan pangan nasional dalam keadaan aman. Pasalnya pada tahun 2016 produksi pangan Indonesia mencapai surplus sehingga kebutuhan pangan dapat tertutupi dengan produk dalam negeri. Apalagi berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) produksi pertanian Indonesia meningkat cukup signifikan.

"Kalau biasanya kita defisit, sekarang kita surplus beras, karena pada periode bulan Juli-September 2016 produksi kita sebesar 1 juta ha/bulan, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya 500 ribu ha/bulan" kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat Pembukaan Pameran Pangan Nusa dan Pameran Produk Dalam Negeri (PPN-PPDN) di Stadion Mandalakrida, Yogyakarta (6/10).

Kepada masyarakat, Mentan meminta agar tenang dan tidak mengkhawatirkan persediaan pangan. Sekalipun terjadi paceklik atau gagal panen, Mentan meyakini persediaan pangan negara masih cukup untuk menutupi kebutuhan pangan masyarakat yang mencapai 2,6 juta ton beras per bulan. Jika panen gabah per hektar mencapai 6 ton, maka produksi gabah nasional mencapai 6 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara 3 juta ton beras sehingga mencukupi kebutuhan masyarakat sebesar 2,6 juta ton beras per bulan.

"Kebutuhan pangan beras untuk penduduk Indonesia sebesar 2,6 juta ton pertahun. Sehingga akan ada surplus sebesar 400.000 ton apabila hasil produksi beras 1 juta hektar/bulan. Dengan begitu tidak ada musim paceklik lagi untuk tahun ini. Sedangkan dampak cuaca ekstrem seperti banjir yang berpotensi terjadi selama memasuki musim hujan tahun ini, tidak akan mengganggu persediaan beras nasional. Apalagi kami juga sudah melakukan normalisasi irigasi di seluruh lahan pertanian Indonesia bekerja sama dengan Kementerian PU," ucap Mentan

Mentan menambahkan bahwa dengan adanya surplus beras tersebut, merupakan langkah awal yang sangat baik untuk mengantisipasi terjadinya bencana banjir di Kabupaten Garut yang mengakibatkan rusaknya lahan pertanian.

"Kita memiliki surplus 1 juta ton, artinya kita mengantisipasi lebih awal terhadap bencana tersebut, selain melakukan normalisasi dan irigasi seluruh Indonesia bekerjasama dengan Kementerian PU," ujar Mentan. Selain persediaan beras, Mentan juga telah menyiapkan strategi untuk mempertahankan stabilitas komoditas lain, seperti cabai, bawang, dan jagung. Untuk cabai, Kementerian Pertanian telah menyediakan 15 ribu hektare lahan



Mentan Amran Sulaiman saat Pembukaan Pameran Pangan Nusa dan Pameran Produk Dalam Negeri (PPN-PPDN) di Stadion Mandalakrida, Yogyakarta



siap tanam. Sehingga hasil panen komoditas ini bisa mencukupi kebutuhan pasar.

"Kita bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk program penanaman cabai. Polanya kita akan optimalkan penanaman pada bulan-bulan *shortage* sehingga hasil panen bisa flat, pola penanaman seperti ini telah dilakukan pada komoditas bawang, dan terlihat keberhasilannya. Buktinya saat ini Indonesia berhasil menekan angka impor bawang dari luar negeri" ujar Mentan.

Menurut Mentan, hal yang sama juga akan dilakukan terhadap tanaman jagung. Bahkan dalam waktu dekat, Kementerian Pertanian dan Perdagangan akan menanam jagung pada lima ribu hektare lahan di Kabupaten Kebumen.

"Selain mengoptimalkan pola penanaman komoditas pangan, Kementerian Pertanian juga melakukan perbaikan fasilitas penunjang untuk bercocok tanam. Kita akan terus mengoptimalkan irigasi. Kita perbaiki dan pelihara saluran yang sudah ada," kata Mentan.

Sementara itu, dalam rangka mempercepat swasembada daging sapi, Mentan menjelaskan Kementan pada tahun depan akan memberikan empat juta paket inseminasi buatan gratis untuk peternak di seluruh provinsi. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan daging sapi, Indonesia tahun 2016 masih perlu mengimpor satu juta ekor sapi hidup.

"Untuk mempercepat produksi sapi dalam negeri, menurut dia, Kementan dan Kementerian Perdagangan saat ini menerapkan kebijakan baru dengan mewajibkan keberadaan indukan sapi di setiap impor sapi bakalan. Sekarang rata-rata impor sapi bakalan 700 ribu ekor yang kami harapkan 20 persen di antaranya adalah indukan," jelas Mentan.



Mentan, Andi Amran Sulaiman saat memberikan keterangan pers di Kampus Kementan

Untuk Atasi Musim Paceklik Kementan Laksanakan Terobosan Baru

"Mencermati kondisi bulan paceklik selama 20 tahun terakhir, maka sejak Juli 2016 Kementerian Pertanian telah melaksanakan terobosan baru untuk menghilangkan musim paceklik. Hal yang akan dilakukan dengan cara menanam padi pada lahan tadah hujan dan lahan kering melalui pemanfaatan jaringan irigasi"

Setiap tahunnya, musim paceklik kerap terjadi pada bulan Oktober hingga Januari. Biasanya pada musim tersebut, rata-rata stok pangan akan anjlok dan pemerintah umumnya terpaksa memutuskan impor pada periode itu. Untuk itu, pemerintah harus mewaspadai musim paceklik tahun 2016 agar produksi pangan tidak menurun drastis.

"Pihak Kementan telah melakukan terobosan dalam mengatasi ancaman musim paceklik terhadap produksi padi. Mengingat paceklik pada periode November-Januari dapat memaksa pemerintah impor beras akibat stok beras berkurang" kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat memberikan keterangan pers di Kampus Kementan (3/10).

Mentan mengakui pada musim paceklik terjadi penurunan produksi padi pada umumnya. Sebab pada musim itu sudah tidak terjadi panen raya lagi, tinggal panen gandum atau panen padi yang ditanam pada musim kemarau. Apalagi mulai periode itu, curah hujan akan berkurang dan kerap terjadi gagal panen akibat kemarau yang melanda sejumlah wilayah sentra pertanian di Tanah Air.

"Produksi padi yang bersifat musiman setiap tahun mengenal musim paceklik dan musim panen raya. Selama puluhan tahun terjadi paceklik pada Oktober hingga Januari akibat dari luas tanam padi Juli-Oktober rata berkisar 485 ribu hingga 796 ribu hektare. Namun kini Kementerian Pertanian berupaya mengubah hal tersebut" ujar Mentan.

Mentan menjelaskan mencermati kondisi bulan paceklik selama 20 tahun terakhir, maka sejak Juli 2016 Kementerian Pertanian telah melaksanakan terobosan baru untuk menghilangkan musim paceklik. Hal yang akan dilakukan dengan cara menanam padi pada lahan tadah hujan dan lahan kering melalui pemanfaatan jaringan irigasi, menggerakkan pompa yang menganggur, membangun embung, longstorage,

dam-parit, dan sumur air tanah dangkal dan maksimalkan pompa air di lokasi yang tepat.

"Paceklik yang kerap terjadi selama Oktober-Januari setiap tahun diproyeksikan bisa dihindari. Untuk mengantisipasi terulangnya musim paceklik ini Kementerian Pertanian sejak bulan Juli tahun ini telah melakukan metode menanam pada lahan tadah hujan dan lahan kering melalui pemanfaatan jaringan irigasi. Pemerintah memaksimalkan potensi air yang sangat besar dengan membangun irigasi 3,2 juta ha. Hasilnya, Indeks Pertanaman (IP) Juli-September 2016 meningkat dari sekali tanam menjadi dua kali tanam per tahun" jelas Mentan.

Menurut Mentan selain memaksimalkan potensi air, pemerintah juga memperluas lahan serta menerapkan taktik pergeseran musim tanam yang tidak lagi rentan terhadap perubahan iklim. Sedangkan penanaman padi pada periode tersebut dilakukan pada musim kemarau. Dengan penanaman pada musim tidak tanam dan penggunaan varietas yang tahan kekeringan serta tahan genangan, maka tidak akan lagi ada kekurangan produksi di setiap bulan.

"Dengan luas tanam pada Juli yang mencapai 917 ribu ha dan rata-rata produksi padi 6 ton/ha, akan ada 5,4 juta ton padi atau setara 2,7 juta ton beras yang diproduksi pada Oktober 2016. Sementara itu, kebutuhan beras per bulan hanya 2,6 juta ton. Ini sudah surplus. Cadangan 2 juta ton di gudang tidak diganggu. Secara keseluruhan, ada surplus luas tanam pada Oktober 2015 hingga September 2016 sebesar 961 ribu ha jika dibandingkan dengan periode yang sama sebelumnya" kata Mentan.

Mentan menyatakan metode serupa akan diterapkan untuk tanaman jagung, cabai dan bawang merah. Komoditas tersebut akan ditanam pada saat off-season sehingga tidak akan terjadi shortage produksi di bulan-bulan tertentu atau di luar panen raya.

"Solusi mengatasi paceklik itu tidak hanya untuk pertanaman padi, namun juga

diterapkan pada jagung, cabai dan bawang merah dengan menanam pada saat off-season sehingga tidak akan terjadi *shortage* produksi pada setiap bulannya," kata Mentan.

Mentan pun berharap, dengan sejumlah program strategis tersebut upaya pemerintah menjaga pasokan pangan dan keseimbangan harga bisa terwujud.

Menanggapi strategi yang diterapkan Kementan, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional, Winarno Tohir menilai strategi tersebut berdampak pada peningkatan luas tanam. Datanya menunjukkan, luas tanam kotor pada Juli 2016 seluas 917 ribu ha, kemudian meningkat di Agustus 2016 seluas 952 ribu ha, dan menjadi 1,2 juta ha pada September 2016. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan tanam periode yg sama selama puluhan tahun terakhir.

"Dengan luas tanam Juli ini mulai menghasilkan produksi Oktober 2016 sekitar 2,7 juta ton beras. Produksi ini mencukupi buat kebutuhan konsumsi penduduk 2,6 juta ton sebulan. Produksi padi bulan berikutnya pun lebih tinggi dan tak terjadi paceklik, pada periode Juli-Oktober selama ini yaitu titik kritis paceklik. Akan tetapi, program dari Kementan bisa menyelesaikan persoalan klasik tahunan ini dengan baik" kata Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional.

Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional menyebutkan luas tanam meningkat di musim paceklik dan tidak ada lagi defisit produksi pangan setiap bulannya, dengan capaian itu, kinerja produksi padi pada 2016 diprediksi jauh lebih tinggi dibandingkan 2015.

"Mengingat terjadi surplus luas tanam pada Oktober 2015 hingga September 2016 sebesar 961 ribu ha dibandingkan periode yg sama tahun sebelumnya. Bila dengan asumsi memakai metode perhitungan produksi yg ada selama ini, diprediksi produksi 2016 ini lebih tinggi 4,7 juta ton GKG dibandingkan 2015," tutur Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional.

Mentan: "Gunakan Anggaran Yang Kecil Untuk Tingkatkan Produksi"

"Para pejabat Kementan agar tetap bekerja keras mendorong produksi dengan kebijakan menggunakan anggaran yang lebih kecil untuk tingkatkan produksi karena pemerintah menginginkan semua pihak dapat menekan kebijakan impor pada beberapa komoditas"

Dengan anggaran yang semakin ketat, tidak menjadi alasan berhenti bekerja. Justru hal tersebut diharapkan dapat memicu setiap unit kerja untuk membuat kebijakan baru yang dapat mendorong produksi. Demikian dikatakan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman pada pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) lingkup Kementerian Pertanian, di Kampus Kementan (10/10)

Kepada pejabat yang baru dilantik, Mentan berpesan agar tetap bekerja keras mendorong produksi dengan kebijakan menggunakan anggaran yang lebih kecil untuk tingkatkan produksi karena pemerintah menginginkan semua pihak dapat menekan kebijakan impor pada beberapa komoditas. Saat sekarang beras ketan sudah tidak impor, diharapkan impor bawang putih, kedelai dapat dihentikan.

Pada acara itu, Mentan melantik I Ketut Diarmita sebagai Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Mulyadi Hendiawan sebagai Sekretaris Badan Ketahanan Pangan, Maman Suherman sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Agus Wahyudi sebagai Direktur Tanaman Semusim dan Rempah (Ditjen Perkebunan) serta Andi Nur Alam Syah sebagai Kepala Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian.

Terkait swasembada daging Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang baru, Ketut Diarmita

mengatakan, salah satu program yang bakal digenjut untuk mencapai swasembada daging adalah dengan Upsus Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB).



Mentan, Andi Amran Sulaiman memberi sambutan pada pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Kementan di Kampus Kementan



Mentan, Andi Amran Sulaiman pada pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) lingkup Kementerian Pertanian, di Kampus Kementan

"Kita sudah punya gambaran dan hitung-hitungan jumlah sapi kita yang

menjadi akseptor untuk program Inseminasi Buatan (IB). Sehingga nanti akan ada kelahiran 3 juta anak sapi untuk ketersediaan di akhir tahun 2017," kata Dirjen Peternakan.

Dirjen Peternakan menerangkan penyebaran SIWAB nantinya terbagi dalam bentuk kluster. Pembagian kluster tersebut nantinya berdasarkan kondisi jumlah sapi dan luasan lahan yang tersedia. Setidaknya ada tiga kluster yakni intensif, semi intensif dan ekstensif. "Untuk intensif nanti akan ada di Bali, Jawa, Lampung. Sedangkan ekstensif ada di Maluku, Papua, NTT dan NTB.

Menurut Dirjen Peternakan diperkirakan anggaran untuk program SIWAB sekitar Rp 1,1 triliun. Anggaran tersebut untuk peningkatan kebuntingan sapi indukan melalui sistem Inseminasi Buatan (IB). Dengan IB tersebut intervensi kepada peternak dengan memastikan sapi betina bisa bunting serempak," ungkapnya.

Untuk mendukung program Upsus SIWAB, Dirjen Peternakan menegaskan tenaga inseminator akan diperkuat. Karena itu program tersebut akan dikerjakan bersamaan. Ditjen PKH berharap Balitbangtan turut serta dalam teknologinya. Sedangkan Ditjen PKH ditugasi untuk meningkatkan mutu inseminator agar sejalan dengan programnya.



Kementan Dorong Petani Gunakan Benih Padi Hibrida

"Ngawi merupakan daerah yang menjadi penopang swasembada padi dan berhasil membudidayakan benih padi Hibrida Sembada, Petani setempat agar terus memanfaatkan padi dengan varietas hibrida karena jelas terbukti mampu meningkatkan hasil produksi pertanian khususnya padi"

Masih banyak petani Indonesia yang sekadar menanam padi saja tanpa mempertimbangkan benih. Padahal, pemilihan benih padi hibrida atau unggul berpengaruh terhadap produksi panen. Kementerian Pertanian mendorong petani untuk lebih memprioritaskan penanaman tanaman pangan dengan menggunakan benih unggul karena dengan jumlah besarnya biaya dan tingkat waktu bekerja yang sama namun hasilnya akan berbeda, hingga sampai 30%.

"Masyarakat jangan hanya asal tanam benih saja tetapi harus dengan benih unggul yang produksinya jauh lebih besar, hingga naik hingga tiga ton per hektare. Jika petani beralih menggunakan benih unggul, maka ada nilai tambah hingga 120 triliun dari total lahan nasional. Kementan saat ini mulai mengalokasikan benih hibrida subsidi dan gratis untuk petani di seluruh Indonesia" kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat panen raya benih padi hibrida Sembada di Desa Ngompo, Kecamatan Pangkur, Ngawi, Jawa Timur (27/10).

Pada Panen Raya Padi jenis Hibrida Sembada yang dihadiri Watim Pres, Aster Panglima TNI Anggota DPR RI Komisi IV, Kepala Dinas Pertanian Prov. Jatim, Direktur Utama Biogen, Danrem 081/DSJ, Bupati Ngawi, Dandim 0805/Ngawi, S.I.P, Dandim Jajaran Korem 081/DSJ dan Kapolres Ngawi, Mentan menyebutkan jenis yang dipanen adalah varietas benih padi hibrida merupakan hasil karya budi daya benih padi hibrida Sembada.

"Dengan dukungan Kementerian Pertanian dan jajaran Pemerintah Daerah, PT Biogene Plantation bersama Kelompok Tani Ngawi berhasil membudidayakan benih padi dengan dua jenis padi hibrida Sembada B9 dan Sembada 168. Kedua varietas yang dipanen tersebut adalah hasil penangkaran di area seluas 200 hektare yang tersebar di tiga kecamatan di Ngawi, yaitu Pangkur, Padas, dan Kwadungan" ucap Mentan.

Mengingat Ngawi merupakan daerah yang menjadi penopang swasembada padi dan berhasil membudidayakan benih padi Hibrida Sembada, maka Mentan meminta petani setempat agar terus



Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat panen raya benih padi hibrida Sembada di Desa Ngompo, Kecamatan Pangkur, Ngawi, Jawa Timur

memanfaatkan padi dengan varietas hibrida karena jelas terbukti mampu meningkatkan hasil produksi pertanian khususnya padi. Jelasnya, varietas padi hibrida varietas B9 yang dilepas tahun 2008 lalu terbukti mampu meningkatkan produksi padi lebih 8 ton GKP per hektarnya.

"Dengan hitungan tersebut, jika dikalikan 10 juta ton sampai 30 juta ton padi jenis varietas hibrida secara nasional petani mampu meningkatkan produksinya dengan nilai sekitar Rp 120 triliun. Sekarang produksi nasional padi inbrida atau non hibrida hanya mampu 5,5 ton per hektar namun jika dibandingkan dengan padi varietas hibrida ini selisihnya lebih banyak yakni tiga ton per hektar. Maka kami meminta petani betul-betul memanfaatkan padi varietas hibrida ini," pinta Mentan.

Mentan mengungkapkan pemerintah saat sekarang terus berupaya mewujudkan swasembada pangan nasional. Untuk itu Pemerintah sudah menyiapkan sarana produksi sebanyak 100 ribu unit. Selain itu, Pemerintah menganjurkan petani mengasuransikan tanamannya, untuk mengantisipasi kerugian gagal panen akibat banjir maupun lainnya. Sedangkan untuk menyiasati harga gabah yang cenderung turun pasca panen, petani dapat menggunakan bibit unggul guna meningkatkan produksi.

"Penyediaan benih ini adalah gerakan bersama, jadi bukan saja dari perusahaan atau kelompok tani, tetapi perorangan juga bisa berkontribusi. Untuk benih lokal yang unggul akan kita permudah ijinnya. Kemudian ada bantuan subsidi untuk minimal satu juta hektar dan ini gratis untuk petani. Dengan bantuan benih dari pemerintah untuk 5 juta hektar kemudian kita tanam dan bisa

mengangkat 3 ton/hektar, berarti 15 juta ton, sehingga pendapat petani naik mencapai Rp60 triliun" ungkap Mentan.

Menurut Mentan salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan swasembada beras adalah pemberian bantuan benih padi unggul bagi petani karena memiliki hasil panen lebih banyak dibanding varietas lain seperti Hibrida Sembada yang mampu menghasilkan 9-12 ton gabah kering panen per hektare. Padahal hasil panen benih non-unggul maksimal hanya 5,5 ton per hektare. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian akan memberi bantuan subsidi benih padi hibrida minimal 1 juta hektar dan maksimal 4 juta hektar sawah. Diharapkan dengan menanam padi dari jenis hibrida sembada, panen petani bisa mencapai minimal 8 ton per hektar.

"Bantuan benih padi ini untuk lahan seluas 5 juta hektar. Karena diberi bantuan benih unggul maka saya berharap tidak boleh petani beli benih sembarangan. Benih ini sangat baik untuk dikembangkan, karena kenaikan hasil panen itu, berdampak positif terhadap pendapatan petani. Jika per hektare bertambah 3 ton, secara nasional penghasilan petani padi naik Rp 120 triliun. Kita kejar standar nasional yang hanya panen sekitar 3 ton per hektar. Maka dengan benih jenis hibrida, kita bisa panen minimal 8 ton per hektar Oleh karena itulah, pemerintah memberikan subsidi benih untuk 4 juta hektare dan bantuan gratis bagi 1 juta hektare sawah di Indonesia" ujar Mentan.

Lebih lanjut Mentan menegaskan bahwa untuk menembus target yang dipasang, pemerintah saat sekarang menyediakan anggaran khusus untuk benih hibrida yang dialokasikan bentuk subsidi maupun dalam bentuk gratis terhadap petani. Bahkan untuk anggaran benih gratis saat

sekarang pemerintah telah mengalokasikan kurang lebih 600 ton untuk areal tanam 40 ribu hektar lahan. Sedangkan penyediaan benih padi hibrida bersubsidi pemerintah menyediakan 2.250 ton dengan cakupan 150 hektar lahan.

“Atas arahan Bapak Presiden, kita bagi benih gratis untuk 1 hingga 2 juta hektare dan benih subsidi minimal untuk empat hektare. Lahan lima hektare tersebut sudah 34 persen dari lahan pertanian di Indonesia. Benih padi hibrida yang didapatkan secara gratis ini bermacam jenisnya mulai IPB3S, Inpari dan Sembada sendiri. Dengan demikian program pertanian semacam ini menjadi perhatian kita jangan sampai masyarakat asal tanam benih saja tanpa memperhatikan kualitas benih itu sendiri.” tegas Mentan. Mentan menyebutkan dalam rangka mencapai swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

maka selain bantuan benih, pemerintah akan terus membantu petani dengan memberikan bantuan alat pertanian, memperbaiki infrastruktur irigasi, dan penyaluran asuransi bagi tanaman padi yang diterjang bencana alam. Pihak Kementan juga bertekad untuk terus menambah bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) tahun depan.

“Saya minta anggaran biaya perjalanan dinas PNS di Kementan dialihkan untuk membeli alsintan. Aku pilih biaya perjalanan dinas dikurangi daripada alsintan dikurangi untuk rakyat, itu pilihan kami, biaya perjalanan dinas bisa mencapai Rp1,2 triliun per tahun. Saya memastikan uang triliun itu meningkatkan produksi pangan. Kami minta Rp1,2 triliun biaya perjalanan dinas dapat dialihkan untuk dijadikan traktor, dijadikan combine harvester, jadikan alsintan, jadikan benih,” ujar Mentan.

Dalam menjaga kedaulatan pangan, peran dan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional, sehingga sinergitas TNI dengan rakyat akan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Untuk itu Mentan juga menyampaikan terima kasih kepada TNI dan jajarannya yang telah membantu pemdampingan kepada petani dalam upaya khusus swasembada pangan.

“Kalau rakyat menyatu dengan TNI swasembada pangan pasti akan berhasil. Peran TNI dalam mendukung secara penuh upaya menciptakan kedaulatan pangan, merupakan langkah dalam menjaga kedaulatan pangan bangsa Indonesia. Sesuai instruksi Presiden untuk membangun daerah terdepan dan pinggir, Kementan juga membuka lahan pertanian di daerah perbatasan. Dan, kami menjaga perbatasan dengan produksi padi” kata Mentan.

Untuk Wujudkan Kemandirian Pangan Asal Hewan Mentan Ajak Peternak Gunakan Sistem IB

“Upsus Siwab adalah bentuk komitmen pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pangan asal hewan dan meningkatkan kesejahteraan peternak sekaligus mengejar swasembada sapi pada tahun 2026 mendatang. Upsus Siwab mencakup dua kegiatan utama yaitu peningkatan populasi melalui inseminasi buatan, dan kawin alam”



Kementerian Pertanian berkeinginan mewujudkan daerah Kabupaten Bone di Sulawesi Selatan sebagai daerah swasembada daging sapi sehingga keberhasilan peternak di Bone dapat menghasilkan perbandingan hasil kawin inseminasi 1 ekor banding 10 ekor anak sapi lokal, demikian yang dikatakan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat melakukan panen pedet 1000 ekor sapi hasil Inseminasi Buatan (IB) di Desa Hulo, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, (14/10).

Kegiatan panen pedet yang mengambil tema ‘Siap Bahu - membahu Mensukseskan Peternak dan dihadiri Wakil Gubernur Sulsel, Bupati

Bone, Asisten Teritorial Mabes TNI, dan sejumlah perwakilan Pemkab di Sulawesi Selatan merupakan program Kementerian Pertanian, dibawah binaan Dinas Peternakan Kabupaten Bone sebagai upaya percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau untuk memenuhi kebutuhan daging sapi dalam negeri.

“Upaya yang dilakukan kami ini merupakan suatu bentuk komitmen pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pangan asal hewan dan meningkatkan kesejahteraan peternak sekaligus mengejar swasembada sapi pada tahun 2026 mendatang, sesuai dengan target Presiden dan termaktub dalam Permentan No 48/Permetan/PK.210/2016. Tentang UPSUS peningkatan populasi sapi dan kerbau bunting” kata Mentan.



Mentan memaparkan, Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan ditahun 2016 mencatat populasi sapi dan kerbau mencapai 18 juta ekor, yang terdiri dari sapi potong 16 juta ekor, sapi perah 533 ribu ekor, dan kerbau 1,4 juta ekor.

“Dari populasi tersebut jumlah dari sapi dan kerbau betina dewasa sebanyak 6,4 juta ekor, yang terdiri dari sapi potong 5,6 juta ekor, sapi perah 296 ribu ekor dan kerbau sebanyak 452 ribu ekor. Berdasarkan data tersebut 74 persen diantaranya merupakan sapi betina produktif,” papar Mentan

Lebih lanjut Mentan menerangkan bahwa pihak Kementan telah meluncurkan program Upaya Khusus, Sapi Indukan Wajib Bunting atau Upsus Siwab. Program tersebut bertujuan untuk akselerasi penambahan populasi sapi potong didalam negeri.

“Upsus Siwab akan memaksimalkan potensi sapi indukan di dalam negeri untuk terus dapat menghasilkan pedet, Upsus Siwab ini mencakup dua kegiatan utama yaitu peningkatan populasi melalui inseminasi buatan, dan kawin alam,” terang Mentan.



Mentan menjelaskan, upaya khusus Siwab akan memaksimalkan potensi sapi indukan di dalam negeri, dengan memaksimalkan inseminasi buatan. Ditargetkan, akan ada kelahiran 3 juta anakan sapi dan kerbau.

"Selain itu, sasaran lainnya adalah penanganan kasus gangguan reproduksi pada sapi sebanyak 300.000 ekor. Dari jumlah itu, 180.000 ekor di antaranya sembuh dan siap untuk diberikan inseminasi buatan" jelas Mentan.

Mentan mengajak peternak untuk beternak dengan sistem Inseminasi Buatan atau kawin suntik yaitu suatu cara atau teknik untuk memasukkan mani (sperma atau semen) yang telah dicairkan dan telah diproses terlebih dahulu. Mani yang berasal dari ternak jantan disuntikkan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang disebut "insemination gun".

"Satu ekor sapi hasil IB setara dengan 10 ekor sapi lokal, artinya apa satu kali kita dapat hasil IB itu ada lompatan besar sehingga penghasilan bisa meningkat empat kali lipat, tiga kali lipat, dan seterusnya. Jadi mari ramai-ramai melakukan IB, kalau kita laksanakan ini secara masif kebutuhan daging dalam negeri bisa terpenuhi," ajak Mentan. Pada acara tersebut 1000 ekor pedet se-Sulawesi Selatan hasil dari inseminasi buatan mencapai 25.432 ekor kelahiran anak sapi, dari 20 Kabupaten dan kota di Sulsel sejak bulan September 2016. Untuk panen 1.000 pedet tersebut, Kementan mendapatkan rekor dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia (Leprid). Mentan pun langsung memberi

penghargaan kepada Pemkab Bone berupa 200 semen (cairan sperma) beku untuk bahan inseminasi sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan hasil peternakan dan pertanian di Bone. Mentan juga menantang pelaku dan peternak di Sulsel tentang kebutuhan Inseminasi Buatan (IB) yang akan dibantu oleh Kementerian Pertanian.

"Berapapun kebutuhannya akan kami penuhi. Kami targetkan tahun 2018 kegiatan Upsus ini akan memberikan kontribusi kelahiran sapi sebanyak 3 juta ekor. Ini bisa mengikuti jejak di Lamongan, nanti kita targetkan bila perlu di Sulsel ini minimal ada 700 ribu sampai 1 juta kelahiran, saya optimistis pelaksanaan program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus siwab) pada 3 juta ekor ternak di tahun 2017 bisa segera terealisasi. Saya optimis, kalau kalkulasi ini berjalan dengan baik. Sapi kita ada 5 juta dan semuanya siap bunting semua, target Upsus siwab bisa segera terealisasi dengan baik," ucap Mentan.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Bone, Andi Fahsar Padjalangi mengaku, populasi ternak sapi di Bone mencapai 364 ribu ekor diluar ternak hasil inseminasi buatan. Populasi ternak sapi di Bone masuk tiga besar di Indonesia. Bone juga menjadi daerah pemasok sapi potong.

"Suatu kebanggaan bagi kita karena Bone ditetapkan menjadi daerah panen pedet. Setelah pencanangan secara nasional, Sapi-sapi dari Bone kita kirim ke Sulawesi Tenggara, Utara dan beberapa daerah di Kalimantan," kata Bupati Bone.

Bupati Bone, mengatakan bahwa untuk memaksimalkan program Upsus Kabupaten Bone idealnya harus memiliki inseminator 150 orang karena satu orang inseminator bertanggungjawab 2 desa dan jumlah desa ada 347 desa.

"Bone merupakan pemasok daging terbesar nomor 3 di Indonesia dan perkembangan IB di Bone sangat pesat, hanya saja, mereka masih kekurangan tenaga inseminator, karena masih minim. Bone minimal memiliki 150 inseminator. Minimal 1 inseminator melayani dua desa," kata Bupati Bone.

Sementara itu Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang mengatakan, Sulsel untuk mensukseskan Program Siwab telah menyiapkan tenaga inseminator sebanyak 340 orang dan memberikan insentif Rp.150 ribu untuk setiap satu kelahiran pedet hasil IB.

"Kalau Sulsel siap untuk menjadi propinsi swasembada sapi, kami berharap inseminator dapat ditambah agar cukup untuk mengembangbiakkan sapi Inseminasi Buatan IB" kata Wakil Gubernur Sulsel.

Wakil Gubernur Sulsel juga mengatakan Pemerintah Provinsi Sulsel telah memberi penghargaan kepada tiga kabupaten atas keberhasilannya dalam meningkatkan peternakan di wilayahnya. Yaitu kepada Pemkab Bone untuk bidang ternak besar, dengan populasi 362.819 ekor, Pemkab Jeneponto untuk bidang ternak kecil dengan populasi kambing 186.417 ekor dan Pemkab Sidrap, bidang ternak unggas dengan populasi 11.889.408 ekor.

Program Kementan Targetkan Swasembada Pangan Dimulai Dengan Swasembada Beras

"Masing masing provinsi telah merumuskan program dan anggaran untuk pembangunan pertanian. Targetnya adalah mandiri pangan. Target pertanian nasional adalah swasembada pangan. Target tahun tahun ke depan swasembada beras. 30 tahun ke depan Indonesia harus menjadi lumbung pangan di dunia, Upaya swasembada dimulai dengan swasembada beras"

Saat sekarang Kementerian Pertanian sedang melaksanakan program pembangunan pertanian sebagai penggerak ekonomi di wilayah perbatasan. Untuk itu Kementan menargetkan Kalimantan dapat swasembada pangan pada 2018. Dalam mencapai program tersebut Kementan akan memenuhi berbagai usulan sarana dan prasarana dari masing masing provinsi. Khusus untuk jagung, berapapun akan tanam, Kementan telah menyiapkan pupuk dan benih. Demikian yang dikatakan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat rakor pangan yang mengusung tema "Mandiri Pangan, Borneo Sejahtera" di Balikpapan, Kalimantan Timur (12/10).



Mentan Andi Amran Sulaiman memberi sambutan saat rakor pangan di Balikpapan, Kalimantan Timur



"Target pertanian nasional adalah swasembada pangan pada 2017. Kita harus bisa mandiri. Target kita tahun tahun depan



swasembada beras. Bahkan 30 tahun ke depan Indonesia harus menjadi lumbung pangan di dunia. Selain itu, Pulau Kalimantan juga sudah bisa swasembada pangan pada 2018. Upaya swasembada dimulai dengan swasembada beras. Kalimantan ditargetkan bisa swasembada beras paling lambat 2018 mendatang. Kementan mencurahkan perhatian agar Kalimantan swasembada beras bisa terwujud. Kalau bisa tahun depan swasembada beras. Tapi paling lambat 2018," kata Mentan.

Mentan mengungkapkan keoptimisan akan tercapainya target swasembada pangan didasarkan oleh capaian pembangunan pertanian yang terjadi di tahun 2016 dimana hampir semua komoditas pertanian meningkat secara signifikan. Angka Ramalan II (ARAM II) 2016. Produksi Padi, jagung dan kedelai mencapai 79,4 jt ton, 23,16 jt ton dan kedelai 0,88 juta ton. Khusus Padi dan jagung masing masing meningkat 4,97% dan 18,11% dibanding tahun 2015.

Mentan menuturkan konsep swadaya pangan masing-masing daerah akan dilakukan di semua provinsi Indonesia bagian timur. Mentan melarang ketergantungan pangan antara masing-masing daerah yang bisa berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan. Pengadaan pangan dari daerah lain, sangat membebani masyarakat setempat yang menanggung biaya transportasi.

"Sistem seperti itulah yang menjadi faktor utama peningkatan angka inflasi dan berdampak pada peningkatan kemiskinan masyarakat. Biaya transportasi pengangkutan bahan pangan itu pun jadi beban konsumen. Harga beli bahan pangan jadi semakin tinggi. Untuk itu saya menegaskan tidak boleh ada lagi pembelian pangan antar daerah," tutur Mentan.

Dalam Rakor tersebut, Mentan menyebutkan masing masing provinsi telah merumuskan program dan anggaran untuk pembangunan pertanian di Kalimantan. Targetnya adalah mandiri pangan. Fokus komoditas telah disusun dan kebutuhan sarana prasarana telah juga dirumuskan.

"Untuk mewujudkan swasembada beras saya minta komitmen dan kerja keras di wilayah ini. Kalimantan ini kaya raya akan sumber daya alam, berdasarkan data dari dinas yang diperoleh Kalimantan, terdapat 1 juta hektar lebih sawah dan kebutuhan beras sekitar 2 juta ton," kata Mentan.

Menurut Mentan untuk mewujudkan swasembada saat sekarang Kementan memfokuskan penanganan dan bantuan kepada pulau Kalimantan. agar tahun 2018 mendatang, Kalimantan mampu swasembada beras. Komitmen untuk swasembada pangan termasuk beras, itu ditandai dengan bantuan Kementan berupa alat pertanian, pompa dan traktor terutama pada Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang masih tertinggal dibanding provinsi lain di Kalimantan dalam upaya mewujudkan kemandirian pangan. Jika program swasembada itu tidak

teralisasi, maka bantuan keuangan dan peralatan pertanian dari Kementariannya akan dihentikan.

"Dari lima provinsi di Kalimantan, Kalimantan Selatan sudah dapat mewujudkan kemandirian pangan. Begitu juga

Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. hanya Kalimantan Timur dan Utara yang belum swasembada beras. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan beras Kaltim harus dipasok dari Sulawesi dan Jawa 100 ribu ton pertahun. Belum terwujudnya kemandirian pangan mengakibatkan pemerintah di daerah didera frustrasi akibat inflasi. Pasalnya, bahan pangan kebanyakan didatangkan dari luar daerah, seperti Sulawesi Selatan dan Jawa, sementara Kalimantan memiliki lahan luas yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian," ujar Mentan.

Mentan menjelaskan Kalimantan memiliki lahan baku sawah 1.047.837 hektar. Andai para petani mampu memanen 2 kali dalam satu tahun, maka produksi bisa mencapai 5 juta ton beras. Dengan konsumsi per tahun hanya 2-3 juta ton, tentu swasembada pangan dan kemandirian pangan bisa diwujudkan. Sedangkan untuk Kalimantan Timur punya modal utama menjadi salah satu lumbung padi nasional

"Kalimantan Timur memiliki lahan pertanian seluas 20 ribu hektare, serta didukung oleh ketersediaan air sungai. Permasalahan utamanya adalah optimalisasi pengelolaan lahan pertanian yang belum digarap maksimal. Lahan yang ada hanya dikelola sekali dalam setahun. Kalau dapat dikelola dua hingga tiga kali setahun, maka masalah pencapaian target swasembada di Kalimantan Timur semuanya akan selesai," jelas Mentan.

Mentan mengatakan beberapa kabupaten seperti Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara dan Berau menjadi lumbung padi Kalimantan Timur Seluruh Kalimantan Selatan juga daerah pertanian yang subur.

"Bahkan para petani di Kalimantan Selatan menanam varietas padi lokal yang khas dan menguasai cara bercocok tanam di lahan pasang surut. Semua potensi itu yang sedang kami kumpulkan untuk perwujudan swasembada tersebut," kata Mentan.

Lebih lanjut Mentan menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi tepat guna bisa menjadi jalan keluar banyak persoalan di bidang pertanian. Termasuk kendala menurunnya minat sumber daya manusia pertanian. Pemanfaatan teknologi meningkatkan produksi hasil pertanian. Produktifitas petani dan pemanfaatan lahan akan terbantu teknologi yang sudah semakin berkembang.

"Yang dibutuhkan sekarang teknologi. Namanya transformasi social atau pergeseran (dari padat karya menjadi teknologi). Para petani tetap akan terus ada, tetapi perlu peningkatan kualitas. Beberapa hal yang bisa dilakukan adalah memberi ratusan alat pertanian mesin pompa air untuk mengairi lahan pertanian" tegas Mentan

Mentan berkomitmen melakukan modernisasi pengelolaan sawah di Kalimantan Timur dengan mengirimkan 100 pompa air serta traktor pengelola tanah. Kementerian Pertanian juga siap menanggung biaya pembukaan lahan area persawahan baru guna mewujudkan target swasembada pangan tersebut.

"Kementerian pertanian bersedia menanggung biaya pembukaan sawah baru demi mewujudkan target swasembada pangan di Kaltim. Sementara ini cukup intensitas pertanian di Kalimantan Timur. Namun kalau perlu, bisa saja dibuka lahan



baru. Pusat yang nanggung,” ujar Mentan.

Mentan menerangkan saat sekarang Kementerian Pertanian memiliki anggaran hingga Rp4 triliun yang dialokasikan khusus untuk mencetak sawah. Di Kalimantan Utara, ribuan sawah baru dicetak sejak Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

“Sekarang kami fokus di Kalimantan dulu. Berapapun kebutuhan Kalimantan, akan kita cukupkan untuk swasembada. Beras dulu, saya berharap paling tidak terdapat 20 hingga 30 ribu hektare sawah bisa dicetak di Kalimantan” terang Mentan.



Mentan, Andi Amran Sulaiman saat bertemu dengan penggagas dan pendamping Budidaya Sorgum di Flores, Maria Loretha, di Kanpus Kementan

Kementan Akan Kembangkan Sorgum Untuk Kurangi Ketergantungan Impor Beras

“Pengembangan komoditas sorgum sebagai pangan pokok masyarakat di NTT harus terus di tingkatkan. Langkah pengembangan dan pembudidayaan sorgum bertujuan untuk mengurangi tingginya konsumsi beras nasional dan mengurangi ketergantungan impor beras. Untuk itu Kementerian Pertanian berencana mengembangkan 1.000 hektare komoditas sorgum”

Kementerian Pertanian memberikan apresiasi dengan adanya pengembangan Sorgum di lahan marginal dan menjadi pangan pokok masyarakat setempat. Sehingga masyarakat tidak bergantung pada beras. Pengembangan Sorgum pun harus terus dikembangkan sebagai pengganti terigu, pakan ternak dan salah satu bahan pangan untuk melakukan penganekaragaman pangan. Demikian yang dikatakan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman usai bertemu dengan penggagas dan pendamping Budidaya Sorgum di Flores, Maria Loretha, di Kanpus Kementan (3/10).

Pertemuan tersebut guna membahas pengembangan komoditas sorgum sebagai pangan pokok masyarakat di Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di Flores Timur, Lembata, Manggarai Barat, Sumba Timur dan Ende. Pada pertemuan tersebut Maria Loretha didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Flores Timur dan Direktur Yayasan Pembangunan Sosial Ekonomi Keuskupan Larantuka (Yaspensel).

Dalam pertemuan itu, Mentan berharap agar pengembangan komoditas sorgum sebagai pangan pokok masyarakat di Nusa Tenggara Timur (NTT) harus terus di tingkatkan. Langkah pengembangan dan pembudidayaan sorgum bertujuan untuk mengurangi tingginya konsumsi beras nasional dan mengurangi ketergantungan impor beras. Untuk itu Kementerian Pertanian berencana mengembangkan 1.000 hektare komoditas sorgum.

“Kita upayakan peningkatan produksi di sana, karena menjadi makanan pokok

pengganti beras, sehingga masyarakat tidak bergantung padi beras. Selain sebagai langkah diversifikasi untuk mengurangi ketergantungan pada beras untuk masyarakat flores, target kedepannya pengembangan sorgum akan menjadi salah satu bahan pangan sebagai bentuk penganekaragaman pangan serta bahan pengganti terigu dan pakan ternak” harap Mentan.

Mentan menggarisbawahi manfaat tanaman sorgum yang juga dapat digunakan sebagai bahan baku pakan ternak. Meski tidak merincikan mekanisme pengembangan 1.000 hektare sorgum tersebut, Mentan berjanji pemerintah akan membuka pasar ekspor sorgum ke negara-negara tetangga.

Menanggapi apresiasi Mentan, Penggagas dan Pendamping Budidaya Sorgum, Maria Loretha menyatakan siap mengembangkan Sorgum tersebut. Sebab, di Flores Timur, Lembata, Manggarai Barat, Sumba Timur dan Ende. Serta daerah lain yang ada di NTT tersedia banyak lahan marginal yang cocok untuk dikembangkan sorgum.

Maria Loretha menyampaikan telah melakukan pengembangan sorgum sejak 2007 bersama Yayasan Kehati dan Yaspensel. Pengembangan sorgum tersebut tidak dengan sistem Demonstrasi Plot (Demplot). Namun langsung turun aksi bersama masyarakat petani yang memiliki lahan marginal yang tidak bisa ditanami padi, jagung, dan komoditas pangan lainnya.

“Sorgum yang kami kembangkan sampai saat ini tidak menggunakan pupuk tapi menggunakan air alami saja. Air tersebut membawa unsur hara alami yang menyuburkan lahan dan untuk

kebutuhan tanaman. Padahal lahan itu sudah ditanami sorgum berkali-kali,” ujar Maria Loretha.

Maria Loretha menjelaskan sorgum sangat bisa dijadikan pengganti terigu dengan perlakuan mix 80 persen Sorgum dan 20 persen Cavena. Bahkan menurutnya, Sorgum bukan hanya sebagai komoditas pangan pengganti. Tetapi sebagai bahan pangan pokok masyarakat karena nilai gizinya lebih tinggi dibandingkan beras dan jagung.

“Sorgum dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sorgum dikonsumsi oleh penderita diabetes dan kanker usus. Mereka semuanya sembuh dari penyakit itu karena sorgum mengandung zat Glukan, sampai saat ini luas lahan yang dikembangkan sorgum mencapai 102 ha yang tersebar di Flores Timur, Lembata, Manggarai Barat, Sumba Timur dan Ende” jelas Maria Loretha

Maria Loretha menerangkan Sorgum yang dihasilkan sudah dibeli oleh masyarakat menengah ke atas untuk dijadikan makanan pada anak usia dini. Dan bahkan sudah diekspor ke Eropa. Harga sorgum di tingkat petani Rp 5.000/kg dan harga ekspor mencapai Rp 80.000/kg.

“Untuk itu, kami sangat mengharapkan bantuan pemerintah agar ekspor sorgum ini tidak hanya di pasar Eropa tapi menempus pasar Amerika Latin karena kebutuhan sorgumnya sangat tinggi,” terang Maria Loretha.

Sementara itu Direktur Yaspensel, Romo Benjamin Daut PR menuturkan pengembangan sorgum ini merupakan gerakan pengembangan pangan lokal agar masyarakat mencintai pangan

sendiri. Pola pengembangan yang dijalankan yakni dilakukan oleh kelompok tani sorgum.

"Sorgum yang dihasilkan sebanyak 60% untuk dikonsumsi, 30% untuk dijual dan 10% dimasukkan ke usaha bersama sebagai tabungan petani dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat," tutur Direktur Yaspensel.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Flores Timur, Anton Sogen juga mengatakan pengembangan Sorgum dilakukan di lahan marginal tanpa melupakan pengembangan padi dan

jagung. Lahan yang ditanami padi dan jagung langsung digunakan untuk tanam sorgum tanpa olah tanam.

"Pemerintah Kabupaten Flores Timur siap mendukung pengembangan sorgum agar dapat menciptakan diversifikasi pangan lokal dengan pengembangannya berdasarkan spesifikasi lokal. Namun, pengembangan sorgum ini perlu diintegrasikan dengan ternak sapi karena menyediakan pakan yang bersumber dari kotoran sapi. Petani sudah siap," kata Kadinastannak Flores Timur.

Menurut Kadinastannak Flores Timur

pengembangan sorgum dalam skala besar berdampak langsung ke masyarakat, yaitu terpenuhinya lumbung pangan petani dan gizi keluarga. Selain itu, petani tidak bergantung pada beras dan membuka lapangan pekerjaan, karena masyarakat memanfaatkan lahannya yang selama ini dibiarkan begitu saja. Untuk mengembangkan sorgum secara berkelanjutan, Kadinastannak Flores Timur sangat mengharapkan pemberian bantuan berupa mesin rontok, sosoh, penepungan dan karung untuk pasca panen.

Dukung Indonesia Jadi Lumbung Pangan Kementan Perluas Area Tanam Di Banten

"Kementan berencana memperluas area tanam jagung di Provinsi Banten menjadi 30 ribu hektar. Termasuk di Kabupaten Pandeglang yang pada tahun 2016 direncanakan diperluas menjadi 10 ribu hektar dari sebelumnya 5 ribu hektar. Perluasan area tanam itu untuk mendukung Pemerintah menargetkan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia pada 30 tahun mendatang"

Kementerian Pertanian menargetkan Banten bisa jadi lumbung pertanian yang mensuplai kebutuhan padi secara nasional. Untuk itu Menteri Pertanian menghimbau para petani Pandeglang meningkatkan produktifitas pertanian seperti padi dan jagung. Apalagi sepertiga lahan pertanian di Banten ada di wilayah Kabupaten Pandeglang.

"Dengan luas lahan tersebut diharapkan Propinsi Banten harus jadi lumbung pangan nasional di masa yang akan datang," kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat kegiatan Pencanangan Gerakan Tanam Padi musim tanam 2016-2017, yang berlangsung di Desa Sukadame, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, (17/10).

Kegiatan pencanangan dengan tema "Ayo Bangkit Petani Banten Wujudkan Kedaulatan Pangan" yang dihadiri Gubernur Banten, Kepala Distanak Prov. Banten, Bupati Pandeglang, Danrem 064/MY, Wakapolda Banten, Dandim 0601/Pandeglang serta Kadistanak Kabupaten Pandeglang merupakan gerakan percepatan tanam padi dalam rangka upaya peningkatan produktivitas padi lokasi yang dijadikan area kegiatan seluas 4054 Ha yang terdiri dari Desa Sukadame seluas 360 Ha, Desa Kartasana 160 Ha,



Mentan Amran Sulaiman saat kegiatan Pencanangan Gerakan Tanam Padi musim tanam 2016-2017 di Desa Sukadame, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang



Desa Pagelaran 285 Ha, Desa Bawa 180 Ha dan Desa Senang Sari 69 Ha.

Menurut Mentan, pihak Kementan berencana memperluas area tanam jagung di Provinsi Banten menjadi 30 ribu hektar. Termasuk di Kabupaten Pandeglang yang pada tahun 2016 direncanakan diperluas menjadi 10 ribu hektar dari sebelumnya 5 ribu hektar. Dananya diberikan gratis.

"Perluasan area tanam ini untuk mendukung dicanangkannya Indonesia

menjadi lumbung pangan dunia yang ditargetkan pemerintah 30 tahun mendatang. Saat ini, Indonesia tak lagi mengimpor bawang dan cabai" ujar Mentan

Mentan mengungkapkan Pemerintah menargetkan pada 30 tahun mendatang, Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Pemerintah telah membuat Grand Design, 30 tahun lagi Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Mentan optimis hal itu bisa tercapai, mengingat



saat sekarang Indonesia memiliki stok beras sebanyak 2 juta ton.

"Melimpahnya stok beras ini, juga mempengaruhi harga beras yang turun menjadi Rp 7.400 per kilo. Padahal tahun sebelumnya dengan bulan yang sama, harga beras mencapai Rp 9.000 per kilonya. "Produksi dua tahun ini meningkat menjadi 9 juta ton. Sesuai angka ramalan (ARAM II) BPS produksi padi mencapai 79 juta ton dan tidak pernah diraih selama Indonesia merdeka," ungkap Mentan.

Mentan menyatakan hasil pertanian di Banten telah berkembang pesat dan menjadi salah satu wilayah penyuplai bahan pangan terbesar nasional. Dalam kurun waktu dua tahun, produksi padi di Banten mencapai sembilan juta ton. Dengan luas seluruh Banten mencapai 99170 ribu Km persegi, dan hampir 10 kali lipat Singapura, dengan penduduk 10,8 juta, masyarakat Banten mestinya diuntungkan karena lahan pertanian yang luas. Apalagi Banten merupakan salah satu penopang Jakarta selain Jawa Barat dan Lampung.

"Banten merupakan penopang yang terdekat jaraknya dengan wilayah Ibukota Jakarta, ini kita harus perkuat karena dekat dari pasar. Biaya transport-nya murah, karena biaya angkut komoditas pertanian itu dapat ditanggung konsumen, apalagi lokasi Banten dekat dengan Jakarta yang hanya ditempuh 2 jam. Masalahnya, banyak masyarakat di Indonesia yang malas berusaha. Petani Banten seharusnya lebih sejahtera. Namun karena keterbatasan yang ada, maka pemerintah pusat akan membantunya"

ucap Mentan.

Lebih lanjut Mentan mengatakan bahwa Pemerintah akan menghidupkan kembali lahan tidur di sejumlah area, salah satunya di Pandeglang Banten. Lahan ini nantinya akan menjadi lahan produktif untuk meningkatkan produksi pertanian nasional. Selain itu, Mentan juga berjanji akan mengubah lahan tak produktif agar bisa dikelola para petani di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Banten.

"Lahan tidur di Banten ada karena lahan tersebut kering tak mendapatkan pasokan air. Alhasil, lahan tersebut tidak produktif. Lahan tidur, enam bulan karena tidak ada air. Kita akan diminta bangun dum, sumur dangkal. Ada lahan tidur kurang lebih empat juta hektar di Indonesia. Kita bangunkan petani dan lahan tidur ini. Kita berikan pompa, agar pendapatan petani meningkat" kata Mentan.

Mentan berharap Pemprov Banten dan petani lokal dapat memanfaatkan program Pemerintah Pusat agar perekonomian petani dapat terus meningkat dan petani Pandeglang yang berada di wilayah Banten Selatan terus meningkatkan produktivitas pertanian jagung nya dari lima ribu hektar pada tahun lalu, menjadi 10 ribu hektar pada tahun mendatang. Karena geografis wilayahnya subur sehingga dapat membantu pemerintah pusat mengurangi impor jagung. Kalau tahun 2016 produksi jagung 10 ribu maka diharapkan pada tahun depan 90 ribu ton atau naik 500 persen.

"Tahun ini saja untuk tanam Jagung, di Kabupaten Pandeglang sudah menanam 5 ribu hektar. saya minta tahun depan

agar meningkatkan menjadi 10 ribu hektar. Sehingga tahun depan target produksi jagung semakin meningkat dari provinsi Banten. kunci keberhasilan kita adalah kerja keras untuk mengelola sumber daya alam yang melimpah. Kerja keras yang dilakukan telah menuai hasilnya dengan tidak lagi mengimpor padi, bawang dan cabe serta berhasil menekan impor jagung hingga 60 persen dalam tahun ini" harap Mentan

Dalam kesempatan yang sama Gubernur Banten, Rano Karno menilai Banten menjadi salah satu wilayah prioritas peningkatan hasil pangan. Oleh karenanya, kepada petani untuk menjaga bantuan alat tani.

"Berbagai bantuan yang telah dialokasikan, merupakan wujud nyata perhatian pemerintah kepada masyarakat petani. Jadi alat bantuan dijaga, jangan baru dua bulan sudah rusak," pesan Gubernur Banten.

Sementara itu, Bupati Pandeglang, Irna Narulita menyatakan kesiapannya dalam mensukseskan wacana pemerintah terkait swasembada pangan berkelanjutan. Pasalnya, sepertiga lahan pertanian Banten berada di Pandeglang. "Lumbung padi, jagung, dan kedelai, ada di Pandeglang.

Namun demikian, Bupati Pandeglang meminta agar pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada Pandeglang. Bupati Pandeglang mengingatkan agar pemerintah tidak hanya menuntut produktivitas yang bagus, tetapi sektor irigasi tidak terurus.

Kementan Targetkan Peningkatan Sektor Pertanian di Kabupaten Kebumen

"Kementan menambah bantuan benih jagung lengkap dengan pupuknya untuk menanam jagung di lahan 10 ribu hektar kepada Kabupaten Kebumen. Petani setempat harus kerja keras agar Kebumen tidak lagi jadi kabupaten kedua paling miskin di Jawa Tengah. Dengan swasembada jagung, tahun 2017 Kebumen bisa masuk dalam jajaran 15 besar kabupaten terkaya di Jawa Tengah"



Kebumen diharuskan untuk bisa menanam jagung di lahan seluas 10.000 hektare. Untuk itu Kementan memberikan bantuan operasional kegiatan bercocok tanam bagi petani di Kabupaten Kebumen. Bantuan yang diberikan berupa bibit jagung beserta pupuk.

"Kami tambah bantuan benih jagung lengkap dengan pupuknya untuk menanam jagung di lahan 10 ribu hektar. Setelah ini ibu-bapak petani harus kerja keras agar Kebumen tidak lagi jadi kabupaten kedua paling miskin di Jawa Tengah," kata Menteri Pertanian,

Kementrian Pertanian mendorong perluasan tanaman jagung di Kabupaten Kebumen. Bahkan pada tahun 2017 mendatang Dinas Pertanian dan Peternakan

Amran Sulaiman saat usai melakukan Panen Raya dan Tanam Jagung 5.000 Hektar di Desa Ambalkliwonan, Kecamatan Ambal Kebumen-Jawa Tengah (7/10).

Dalam acara Panen Raya jagung yang dilakukan di atas hamparan 100 ha milik swadaya masyarakat dengan varietas Bisi 18 serta dihadiri Menteri Perdagangan, Komisi IV DPR RI, Komisi VI DPR RI, Ketua DPRD Prov Jawa Tengah, Ka.Dinas Pertanian Prov Jawa Tengah, Dandim, Kapolres Kab. Kebumen beserta SKPD Prov Jawa Tengah dan Kabupaten Kebumen. Panen, Mentan menyatakan pihak Kementan menargetkan Kab.Kebumen masuk menjadi 15 besar dari 33 kabupaten di Jawa Tengah dengan penduduk termiskin melalui peningkatan sektor pertaniannya.

"Dengan swasembada jagung, tahun depan Kebumen bisa masuk dalam jajaran 15 besar kabupaten terkaya di Jawa Tengah. Adapun hasil panen jagung dari Kebumen akan diserap oleh pasar nasional. Selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, harapannya jagung-jagung tersebut dapat diekspor ke negara lain. saya optimistis dengan peningkatan produktivitas hasil panen, tahun depan Indonesia dapat menyetop impor Jagung dari luar negeri. Sekarang kita sudah berhasil menekan angka impor jagung sampai 60 %. Tahun depan targetnya kita tidak akan lagi impor, tapi ekspor" ujar Mentan.

Mentan bercerita ada beberapa Menteri Pertanian dari negara Asia Tenggara yang protes bahwa sekarang mereka sekarang

sangat susah ekspor produk pertanian ke Indonesia. Mentan juga mengakui bahwa ada beberapa negara tetangga juga yang pertaniannya sangat maju dikarenakan petani nya bekerja lebih lama dalam satu hari di banding petani di negara Indonesia.

Saat dialog, Mentan menerima keluhan dari petani mengenai harga jual jagung yang masih sangat rendah padahal harga jagung sekarang sudah Rp 3.150 / kg nya. Untuk itu Mentan mengingatkan agar para petani jagung tidak menjual hasil panennya di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah pusat, yakni Rp 3.150. Jika tidak, hasil panen akan diserap oleh Bulog.

Selain memberikan bantuan pupuk dan benih, Kementan juga menaikkan pemberian bantuan bibit jagung dari semula untuk 5.000 hektare menjadi 10.000 hektare ditambah pemberian bantuan alat-alat pertanian seperti traktor tangan, dan mesin pompa air. Mesin pertanian tersebut diberikan pada dua petani perempuan.

Menanggapi himbauan Mentan, Bupati Kebumen, Muhammad Yahya Fuad menyatakan menerima arahan Mentan untuk mengeluarkan daerahnya dari garis kemiskinan. Bahkan ia optimis bantuan yang diberikan Kementan mampu membantu petani lebih sejahtera. Pasalnya bantuan yang sudah diberikan Kementan begitu bermanfaat.

"Selama ini kami mampu meningkatkan produksi panen jagung sebesar satu ton per hektar. Kondisi ini merupakan prestasi

yang belum pernah dicapai oleh Kebumen selama 15 tahun terakhir. Sebanyak 70 persen penduduk kami petani dan peternak. Jadi kalau petani dan peternak sudah makmur, pasti akan sejahtera semuanya," kata Bupati Kebumen.

Dalam kesempatan yang sama Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita juga menegaskan telah sepakat dan berjanji bersama dengan Kementan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Pemerintah akan hadir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kami sungguh - sungguh akan memberikan perhatian khususnya bagi petani dan peternak," ujar Mendag.

Terkait rencana Kementan dan Kemendag untuk mendorong terciptanya sinergi untuk review mendukung 500.000 Kelompok Tani di Seluruh Indonesia meningkatkan Produksi Pangan, dan membuka Akses Petani Ke Pasar untuk review memotong Rantai pasok maka usai panen jagung, rombongan Mentan bersama Mendag mengunjungi Pasar Giwangretno, Kecamatan Sruweng.

Mentan dan Mendag melakukan blusukan Ke Pasar Giwangretno di Kabupaten Kebumen Dan Pasar Krendetan di Purworejo untuk mendukung revitalisasi Pasar Rakyat. mengingat Pasar tradisional merupakan Ujung tombak Pemasaran Hasil Produksi pertanian dan peternakan, Nelayan Dan Produk usaha Kecil Menengah untuk review memenuhi Kebutuhan society.



Mentan, Andi Amran Sulaiman saat Panen Raya di Desa Ambalkliwonan, Kecamatan Ambal Kebumen-Jawa Tengah

Kementan Perkirakan Harga dan Stok Pangan Aman Sampai Akhir Tahun

"Harga dan stok pangan untuk beberapa komoditas utama seperti beras, bawang, dan cabai, relatif aman sampai akhir tahun. Saat sekarang harga sejumlah pangan terpantau stabil dan pasokan bawang dan beras diperkirakan aman hingga 2017"



Dalam rangka pengamanan pangan seluruh Indonesia, Menteri Pertanian melakukan rapat koordinasi dengan beberapa menteri terkait untuk membicarakan soal pangan, khususnya pangan strategis, seperti beras, bawang, dan cabai, apalagi tiga bulan ke depan biasanya menjadi waktu rawan bagi pasokan pangan masyarakat.

"Menjelang penutupan tahun masyarakat terbiasa menghadapi masalah dengan harga pangan yang melambung. Tetapi kami memastikan ketersediaan pangan khususnya yang merupakan pangan utama seperti beras dalam keadaan aman" kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat ditemui usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, (18/10).

Mentan menuturkan berdasarkan hasil rapat harga dan stok pangan untuk beberapa komoditas utama seperti beras, bawang, dan cabai, relatif aman sampai akhir tahun. Saat sekarang harga sejumlah pangan terpantau stabil dan pasokan bawang dan beras diperkirakan aman hingga 2017.

"Ada penurunan harga 0,9 persen untuk harga beras sekarang. Stok kita sekitar dua juta itu cukup hingga Mei 2017, Untuk bawang harganya justru menurun, dan Kementan harus mendorong agar komoditas ini bisa diekspor sehingga harganya tidak jatuh" tutur Mentan.

Sedangkan untuk cabai, menurut Mentan, jumlah produksinya memang menurun diakibatkan musim hujan yang masih terjadi. Untuk harga cabai di petani masih bagus dengan kisaran Rp 14-15 ribu per kg. Rendahnya harga di petani tetapi harga cabai di tingkat pasar justru meningkat hingga 100 persen dibanding dengan harga yang umum dijual di pasaran.

"Harga cabai saat ini merangkak naik, akibat rantai pasok yang terlalu panjang. Berdasarkan harga rata-rata di DKI Jakarta saja, harga cabai di tingkat pasar mencapai Rp50 ribu untuk cabai merah besar, karena harganya naik di atas 100



persen, maka disparitasnya bisa 100 persen lebih. Untuk itu rantai pasoknya yang harus kita potong," kata Mentan.

Lebih lanjut Mentan menjelaskan untuk menurunkan harga cabai, pemerintah memiliki cara sendiri yaitu menugaskan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyerap komoditas cabai langsung dari petani. Sehingga rantai pasok akan lebih pendek dan harga akan bisa semakin turun. Kementan akan bekerja sama dengan Kementerian BUMN untuk menyerap cabai di petani.

"Cabai naik karena musim hujan saja, tetapi produksi tetap aman karena harga di tingkat petani Rp14 ribu-Rp15 ribu per kilogram. Sehingga, kita sepakat menugaskan BUMN untuk menyerap sehingga rantai pasoknya bisa lebih pendek, BUMN ini untuk menyerap pasokan sehingga rantai pasokannya bisa lebih pendek, Karena sejauh ini terdapat perbedaan harga di petani dan konsumen yang mencapai 100 persen" jelas Mentan

Mentan mengungkapkan pihak Kementan mengantisipasi akan penurunan suplai cabai selama musim penghujan karena selama tiga bulan ke depan dengan perkiraan turun hujan, maka produksi cabai diperkirakan turun. Untuk itu akan diantisipasi dengan membuat lumbung-lumbung cabai di beberapa daerah. Lumbung cabai tersebut nantinya akan menjadi salah satu penyuplai untuk wilayah Jabodetabek.

"Kami ingin menyelesaikan program lumbung cabai di beberapa wilayah di Indonesia. Lumbung itu akan mengatasi masalah berkurangnya pasokan cabai, seperti yang kerap terjadi belakangan dengan membuat lumbung cabai di beberapa kabupaten, salah satunya di

Malang, Jawa Timur. Kami minta pada Dirjen dan Direktur di Kementerian Pertanian untuk menjaga produksi cabai pada saat off season agar tetap aman seperti saat peak season," ungkap Mentan.

Terkait kebutuhan daging sapi segar, Mentan menyebutkan pemerintah akan menyiapkan daging sapi beku maupun daging kerbau guna menutupi minimnya daging sapi segar untuk tiga bulan ke depan.

"Selama ini daging sapi beku banyak digunakan oleh masyarakat dan perusahaan seperti hotel. Daging ini sama higienis dan enakya seperti daging sapi beku yang didatangkan oleh perusahaan penggemukan sapi (feedloter)" ujar Mentan.

Sebelumnya, pihak Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada September, harga komoditas makanan seperti beras, telur ayam, daging ayam ras, wortel dan cabai rawit, bayam dan kentang mengalami penurunan harga karena pasokannya relatif terjaga.

Namun, cabai merah justru mengalami kenaikan harga di berbagai daerah. Pada periode September 2016 dengan harga cabai rata-rata mencapai kisaran Rp35.700 per kilogram karena faktor cuaca maupun distribusi yang terhambat.

BPS mengingatkan inflasi dari kelompok bahan makanan harus diwaspadai oleh pemerintah dalam tiga bulan terakhir, terutama dari komoditas beras maupun cabai merah, agar perkiraan target inflasi pada akhir 2016 sebesar empat persen bisa tercapai.

Bone Berpotensi Besar Kembangkan Sapi dan Padi

"Potensi pertanian di Bone besar, disini sapi potensinya besar, padi juga besar karena ini Kabupaten terluas di provinsi Sulawesi Selatan. Daerah Bone harus dapat berdaulat secara pangan. Karena Bone berpotensi memproduksi beras satu juta ton pertahun dan menghasilkan sapi"

Dalam memenuhi target swasembada pangan dari pemerintah pusat dan daerah, Bone diharapkan menjadi salah satu daerah percontohan pangan, untuk itu Kementerian Pertanian mendorong Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan dapat meningkatkan produksi sapi dan padi.

"Potensi pertanian di Bone besar, disini sapi potensinya besar, padi juga besar karena Kabupaten terluas di provinsi Sulawesi Selatan," kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman di sela-sela peresmian Jembatan Gantung Minrajeng, Bone, Sulawesi Selatan, (13/10).

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, Mentan menyebutkan lokasi produksi padi terbesar provinsi Sulsel ada di Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, dan Luwu (Bodowasipulu) yang mencapai 2,3 juta ton.

"Untuk pengembangan padi, Kementan melakukan program normalisasi irigasi lahan pertanian, mulai dari hulu hingga hilir lahan pertanian wajib teraliri air. Dibangunnya sumber air bagi lahan pertanian maka akan mendorong

produksi pertanian, mulai dari padi, sapi, ikan, hingga ayam" ujar Mentan.

Sebelumnya, pada tahun 2015 pemerintah melalui Kementan telah melaksanakan program rehabilitasi jaringan irigasi tersier seluas 334.450 hektar, memberikan bantuan alat sistem pertanian berupa traktor roda dua sebanyak 1.140 unit, serta pompa sebanyak 1.189 unit. Selain itu, rice transplanter 144 unit, combine harvester 267 unit, power thresher 79 unit, vertical dryer padi 28 unit serta penggilingan padi 86 unit di provinsi Sulsel.

Lebih lanjut Mentan menghimbau kepada masyarakat dan pemerintah Bone, agar daerah Bone dapat berdaulat secara pangan. Karena Bone berpotensi memproduksi beras satu juta ton pertahun dan menghasilkan sapi. Untuk menggarap potensi sapi yang besar diperlukan beberapa program, yakni fokus dengan program inseminasi buatan (IB) serta sapi indukan wajib bunting (Siwab).

"Jadi sekarang dengan gerakan sapi indukan wajib bunting semua sapi indukan yang berkeliranan wajib bunting, ini kabupaten terluas di provinsi Sulawesi



Mentan Andi Amran Sulaiman memberi sambutan pada peresmian Jembatan Gantung Minrajeng, Bone, Sulawesi Selatan

Selatan. Produksi daging sapi dan padi harus kami dorong. Di sini kita fokus sapi dengan program IB. Ini akan panen, hasil tahun lalu ada 1.000 ekor panen pedet (anak sapi)," tandas Mentan.

Mentan menegaskan Kementan bertekad agar Indonesia menjadi negara eksportir. Dulu Indonesia selalu mengimpor jagung sebanyak 3,6 juta ton. Begitupun impor hasil pertanian lainnya, seperti bawang, beras, kedelai, dan cabe. Sekarang Kementan berupaya mengurangi impor hasil pertanian mengingat lahan Indonesia yang masih luas.

"Seiring terobosan yang terus dilakukan dan waktu yang berjalan, impor dapat ditekan. Ke depan, saya optimistis, Indonesia dapat berdaulat di bidang pertanian. Sekarang Alhamdulillah, kita sudah ekspor bawang. Impor jagung kita, turun 60 persen. Ini tidak pernah terjadi selama ini. Insya Allah beras tidak impor lagi dari negara lain," tegas Mentan.



Kalbar Mampu Produksi Bawang Diatas Rata-Rata Nasional

"Tingginya harga bawang merah di pasar menyebabkan ibu-ibu PKK di Kalbar berinisiatif melakukan percobaan untuk menanam bawang di lahan 1 hektare. Bawang yang ditanam di lahan 1 hektare itu ternyata bisa menghasilkan 16 ton. Satu Hektare menghasilkan 16 ton itu sangat luar biasa atau di atas rata-rata nasional yang hanya 10 ton"

Dengan potensi panen bawang yang besar di wilayah Kalimantan Barat, maka Kementerian Pertanian menargetkan ke depan wilayah Kalimantan Barat mampu menjadi sentra bawang merah untuk Indonesia. Dimana daerah sentra bawang merah lebih banyak berasal dari kawasan pulau Jawa.

"Nampaknya sentra bawang merah akan berpindah ke Kalimantan Barat. Ini bisa dilihat, karena di lahan percontohan PKK Provinsi Kalbar di Ngabang, Kabupaten Landak saja, bawang yang ditanam di lahan 1 hektare itu bisa menghasilkan 16 ton dan ini sangat luar biasa," kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat panen bawang merah di Landak, Kalbar (21/10).

Panen bawang merah yang dihadiri Gubernur Kalbar, Anggota DPR RI Komisi IX, Komisi IV DPR RI, Kadistan TPH Kalbar, Bupati Landak, Bupati Sanggau dan pejabat lainnya merupakan inisiatif dari para ibu-ibu PKK yang mengeluhkan tingginya harga bawang merah di pasar. Saat sekarang harga bawang merah di Kabupaten Landak sekitar Rp 40.000 per kilogram, sehingga dengan volume panen tersebut, petani mendapatkan omzet Rp 600 juta.

"Kami apresiasi Ibu Gubernur Kalbar, ini gagasan luar biasa dimulai menanam bawang. Produksinya 16 ton per hektare. Kalau ini dikembangkan luar biasa, ini merupakan pertama kalinya tanam bawang merah di Kalbar. Sebelumnya bawang merah hanya berasal dari Jawa Tengah, sehingga biaya distribusinya membuat harga bawang mahal, ongkos angkutnya juga konsumen yang bayar" kata Mentan.

Mentan mengatakan hal tersebut akan menguntungkan daerah. Oleh karenanya tahun 2017 ditargetkan ada 100 hektar lahan untuk ditanami bawang agar menambah pendapatan daerah dan mengurangi inflasi akibat biaya distribusi bawang merah.



Mentan Andi Amran Sulaiman saat panen bawang merah di Landak, Kalbar

"Kita hitung saja 1 hektar bisa Rp600 juta, ini luar biasa, harga saat ini di Kalbar, biaya produksinya Rp200 juta. Ada untung Rp400 juta, artinya itu perbulan 200 juta. Itu jauh dari gaji menteri sehingga kami minta pak Kadis ini di tambah 100 hektar," kata Mentan.

Lebih lanjut Mentan menerangkan bahwa penyediaan lahan 100 hektar untuk ditanami bawang merah di wilayah Landak, Kalimantan Barat sebagai bentuk apresiasi pemerintah atas keberhasilan warga setempat yang telah berhasil memproduksi 16 ton bawang merah di atas lahan 1 hektar. Pihak Kementan berjanji jika pada tahun-tahun kedepan akan diupayakan penambahan 100 hektar kalau 100 hektar sebelumnya dapat berhasil

"Hasil panen ini, satu Hektare menghasilkan 16 ton itu sangat luar biasa atau di atas rata-rata nasional yang hanya 10 ton, Kami berjanji akan membantu seratus kali lipat lagi dari kebun percontohan di Kalimantan Barat yang ada saat ini. Jadi sekarang 1 hektar maka akan kita bantu semua 100 hektar. Bahkan kalau hasil panen dua bulan lagi dari bantuan nanti kita akan bantu lagi," terang Mentan.

Mentan juga mengatakan di samping bawang merah, pihak Kementan akan mendorong produksi komoditas pangan lainnya. Tahun depan, pemerintah akan memberikan bantuan 5000 hektar lahan untuk digunakan sebagai lahan sawah.

"Sawah kita sudah bangun 4.000 mnta lagi minimal 5000 tahun depan. Minimal 5000 tahun depan. Kami berikan 10.000 tahun lalu tapi apabila lahannya kurang. Dari hasil komunikasi dengan Kementerian LHK telah disetujui untuk

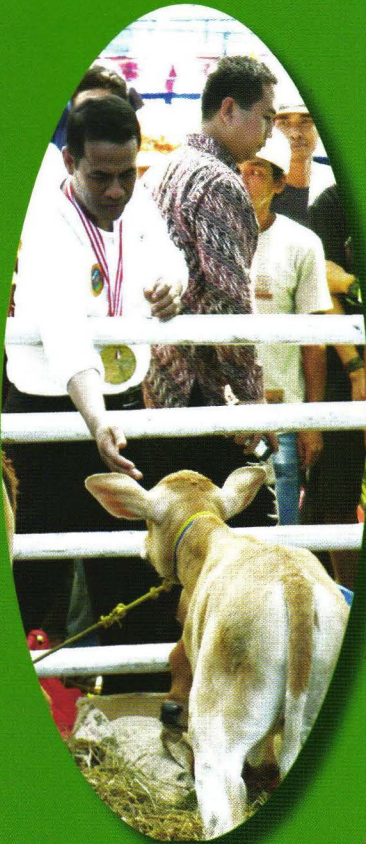
membuka sawah baru" kata Mentan.

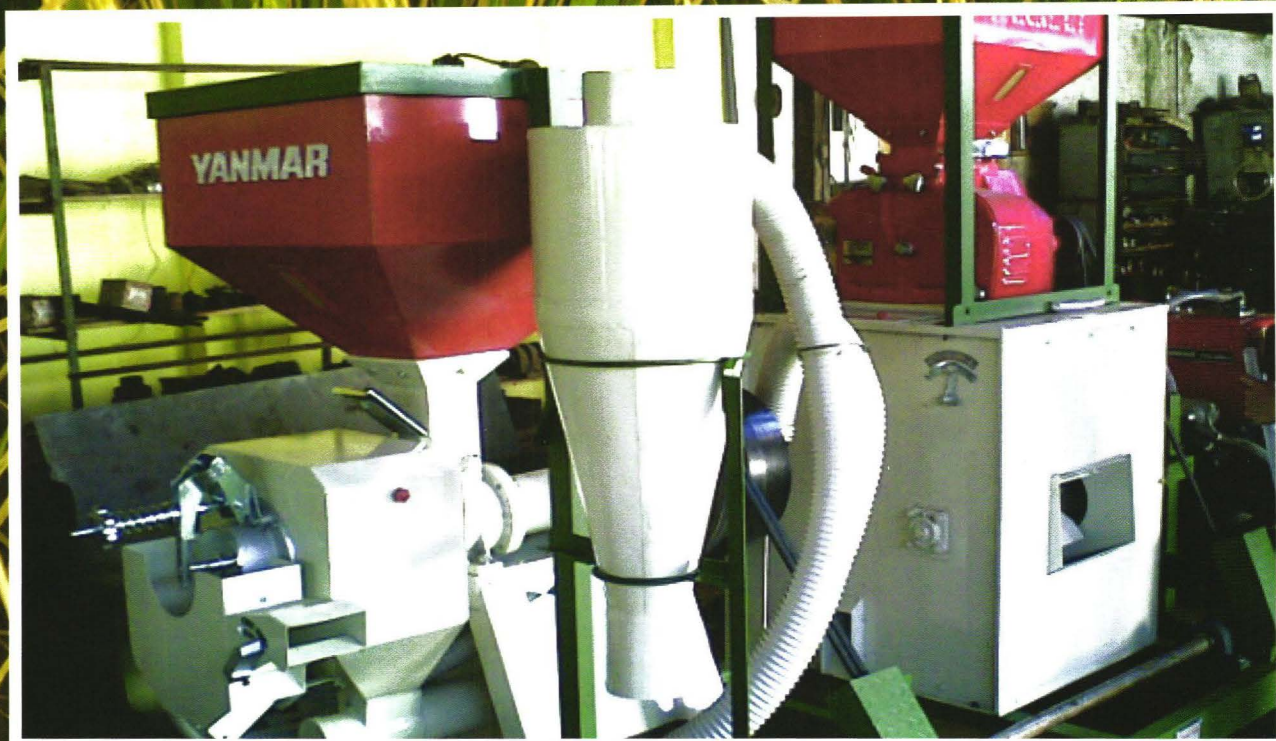
Terkait ekspor, Mentan menjelaskan pasar Malaysia sangat berpotensi dibanjiri ekspor barang produk pertanian dari Indonesia. Apalagi saat sekarang Indonesia sedang membangun ketahanan pangan untuk kebutuhan lokal dan jika berlimpah akan diekspor ke negara tetangga. Malaysia telah impor dari Pakistan, Laos Myanmar. Sekarang Indonesia yang dapat ekspor ke Malaysia

"Harga bawang ini Rp 40.000 jadi inflasinya tinggi kalau sudah dipenuhi bahkan kita bisa mengarah persiapan di Entikong untuk ditanam di perbatasan, ada peluang itu kalau mau bersaing dengan Vietnam, Laos karena tinggal kirim saja sudah ekspor. Bila perlu kita tanam di perbatasan, tinggal melangkah sebelahnya untuk ekspor. Kita hanya jalan kaki tinggal di kirim sudah ekspor," jelas Mentan.

Dalam acara yang sama, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar Frederika Cornelis mengaku banyak ibu-ibu mengeluh harga bawang mahal karena dikirim dari Jawa oleh karena itu muncullah percobaan untuk menanam bawang di lahan 1 hektare. ini baru percontohan kalau sudah 16 ton, maka akan ada bantuan cuma-cuma 100 hektare.

"Karena setiap bulan itu naik harganya kita coba tanam bawang ternyata bisa., Mudah-mudahan kami tim penggerak PKK Provinsi bisa mensosialisasikan sehingga meyakinkan masyarakat itu mau tanam bawang karena kalau orang desa itu nggak mau dia kalau belum lihat kerja nyata," kata Ketua Tim PKK Provinsi Kalbar.





Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
 Jl. Harsono RM No. 3 Jakarta Selatan
 Telp./Fax. (021) 780 4457

humas@pertanian.go.id
 Website: www.pertanian.go.id